

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS P3AP2KB

KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAKPENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan KM.02
BLAMBANGAN UMPU 34764

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat-NYA, Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJIP) P3AP2KB Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023 ini telah selesai kami susun.

Melalui laporan ini dapat diketahui Akuntabilitas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan selama Tahun Anggaran 2023 yang kaitannya dengan nilai capaian hasil pelaksanaan kegiatan dan berusaha melaporkan apa yang direncanakan sesuai dokumen perencanaannya dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Way Kanan, sekaligus sebagai wujud komitmen Kepala Daerah dan segenap instansi terkait serta aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam melaksanakan akuntabilitas yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Kami sangat menyadari bahwa penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJIP) Dinas P3AP2KB ini jauh dari sempurna dan belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karenanya kami terus berupaya memperbaiki dan menyempurnakannya serta kami mengharapkan saran serta kritik yang membangun guna penyempurnaan yang nantinya dapat dijadikan bahan informasi dan perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang sekaligus dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat Kabupaten Way Kanan. Akhir kata, kami berharap LKJIP yang disusun ini dapat memberikan dayaguna baik untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur maupun peningkatan akuntabilitas instansi, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Way Kanan yang Unggul dan Sejahtera.

KEPALA DINAS
P3AP2KB KABUPATEN WAY KANAN,

INDRA KESUMA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19690612 199003 1 007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum.....	1
1.2 Latar Belakang.....	8
1.3 Landasan Hukum.....	10
1.4 Maksud dan Tujuan.....	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategi.....	14
2.3. Tujuan dan Sasaran, Indikator sasaran Renstra dan Target Tahun 2023.....	17
2.3. Perjanjian Kinerja.....	30
2.4. Rencana Kerja Tahunan.....	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Pengukuran Kinerja.....	34
3.2. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja.....	39
3.3. Indikator Kinerja.....	40
3.4. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Organisasi.....	41
3.5. Pengukuran Pencapaian Kinerja.....	42
3.6. Analisis dan Evaluasi Kinerja.....	127
3.7. Akuntabilitas Keuangan.....	138
BAB IV PENUTUP	
3.8. Kesimpulan.....	155
3.9. Saran.....	156

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan dan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1.1.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan berdasarkan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan.

Adapun susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- d. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
- e. Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan
- f. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan

Perempuan

g. UPT

Sekretariat Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan membawahi:

- a. Sub bagian umum dan kepegawaian
- b. Sub bagian perencanaan dan pelaporan
- c. Sub bagian keuangan

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera membawahi:

- a. Seksi Jaminan Ber KB
- b. Seksi Pembinaan Kesetaraan Ber KB
- c. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan membawahi:

- a. Seksi Advokasi dan Penggerakan
- b. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
- c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak membawahi:

- a. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan
- b. Seksi Perlindungan Khusus Anak
- c. Seksi Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan membawahi

- a. Seksi Pengarusutamaan Ekonomi
- b. Seksi Pengarusutamaan Sosial Politik dan Hukum
- c. Seksi Pengarusutamaan Kualitas Keluarga

UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH (UPTD)

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Daerah telah dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan.

UPT Dinas P3AP2Kb dan UPT PPA di Pimpin oleh seorang kepala UPTD, dengan susunan organisasi terdiri dari :

- a. Kepala UPTD
- b. Subbagian Tatausaha
- c. Kelompok Jabatan

Fungsional terbagi dalam beberapa wilayah yaitu :

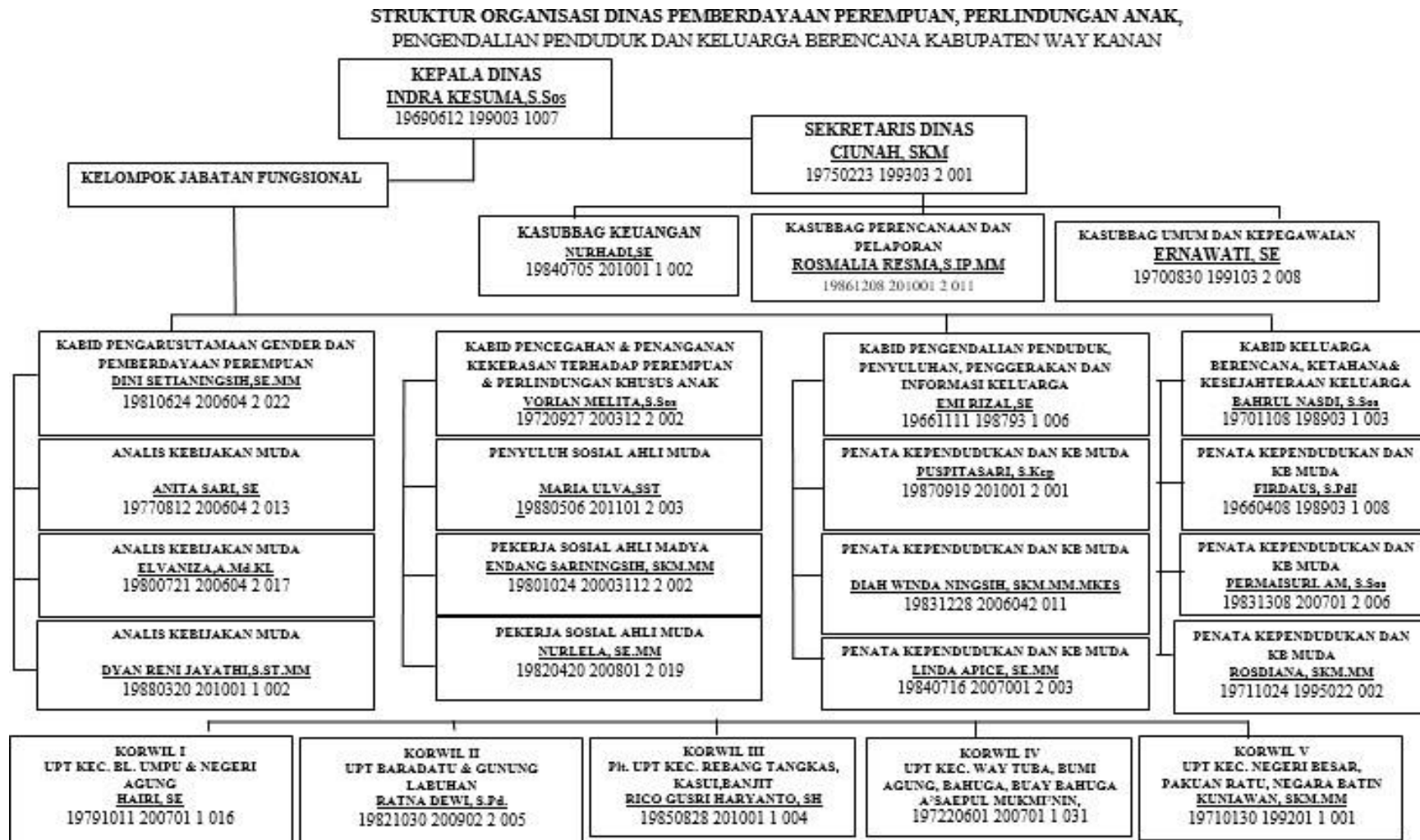
1. UPTD P3AP2KB Wilayah I Membawahi :
 - a. Kec. Blambangan Umpu
 - b. Kec. Negeri Agung
2. UPTD P3AP2KB Wilayah II Membawahi :
 - a. Kec. Baradatu
 - b. Kec. Gunung Labuhan
3. UPTD P3AP2KB Wilayah III Membawahi :
 - a. Kec. Banjit
 - b. Kec. Kasui
 - c. Kec. Rebang Tangkas
4. UPTD P3AP2KB Wilayah IV Membawahi :
 - a. Kec. Way Tuba
 - b. Kec. Bumi Agung
 - c. Kec. Buay Bahuga
 - d. Kec. Bahuga
5. UPTD P3AP2KB Wilayah V Membawahi :
 - a. Kec. Pakuon Ratu
 - b. Kec. Negeri Besar
 - c. Kec. Negara Batin

Unit pelaksanaan Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA)

Terdiri dari

- a. Ka.UPT
- b. Kasubag TU.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
STRUKTUR ORGANISASI DINAS P3AP2KB TAHUN 2023



1.1.2 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

A. Susunan Kepegawaian

Susunan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan tahun 2023 sudah terpenuhi kondisi ideal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, hal ini dikarenakan untuk pengisian jabatan struktural eselon sudah terisi karena pada tahun-tahun sebelum masih ada jabatan eselon IV yang belum terisi.

Adapun perincian susunan kepegawaian saat ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Kepegawaian

No	Status Kepegawaian		Jumlah
	PNS	PTHLS	
1	36 Orang	17 Orang	53 Orang

Berdasarkan Golongan PNS

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	IV	9	
	III	27	
	II		
	I	-	
		36	

Berdasarkan Eselonering

No	Eselonering	Jumlah	Keterangan
1	II	1	
2	III	5	
3	IV	25	

Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Strata II	14	
2	Strata I	20	
3	Diploma III	2	
4	SLTA	0	
5	SLTP	-	

Perlengkapan

Perlengkapan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan dalam menunjang aktifitas dan kinerja sampai saat ini belum memiliki kondisi yang ideal dikarenakan masih ada beberapa perlengkapan yang perlu ditambah jumlahnya seperti laptop, meja kerja dan kursi, mesin pemindai LJK dan lain sebagainya, adapun perlengkapan yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Jumlah Sarana Penunjang pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan

No	Bidang	Kendaraan n Roda 4	Kendaraan Roda 2	Komputer /PC	Laptop/ Notebook
1	Kepala	1	1	0	1
2	Sekretariat	2	4	0	8
3	Bidang Pencegahan dan Penganganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	-	1	0	2

4	Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	-	4	0	1
5	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	1	3	0	1
6	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3	4	0	0

Sumber: Dinas P3AP2KB Way Kanan Tahun 2023

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas P3AP2KB dalam menunjang program pembangunan daerah Kabupaten Way Kanan didukung oleh sarana dan prasarana seperti: kendaraan roda 2 (dua), roda 4 (empat), komputer, meubeleur, akses fasilitas Teknologi Informasi dan lain-lain.

1.2 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance*) merupakan suatu hal yang mutlak dan harus dilakukan sebagai bentuk tolok ukur kinerja pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Guna mewujudkan suatu pemerintah yang "*good governance*" tersebut, perlu adanya suatu komitmen yang nyata dari berbagai pihak yang terkait termasuk didalamnya adalah pihak swasta dan masyarakat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Hal ini sangatlah penting agar setiap komponen secara sinergi bersama-sama untuk mendukung dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah.

Salah satu bentuk upaya untuk mewujudkan pemerintah yang berdedikasi baik, bersih dan berwibawa yaitu adanya pertanggungjawaban dari setiap penyelenggaraan pemerintah yang diberikan otoritas untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dibidangnya meliputi pertanggungjawaban dari aspek keuangan dan fisik serta manfaatnya bagi masyarakat dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit/instansi tersebut.

Sebagai dasar hukum dalam rangka pertanggungjawaban dimaksud sebagaimana tertuang dalam Tap MPR RI Nomor: XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Inpres Nomor 5 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Oleh karena itu setiap instansi pemerintah diwajibkan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang Saat ini Dikenal sebagai Laporan Kinerja Pemerintah (LkiJP) berdasarkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan serta untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban P3AP2KB dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023 dalam rangka melaksanakan visi dan misi Bupati Way Kanan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas P3AP2KB

Kabupaten Way kanan, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja P3AP2KB. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi. Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo UU Nomor 12 Tahun 2008.
6. Undang-undang Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
7. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
8. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi

sebagai Daerah otonom.

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 15 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- 16 Permendagri RI nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Mendagri nomor 15 tahun 2008 tentang Pedum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri atas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

- 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021.
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan.
- 22 Peraturan Bupati Way Kanan Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang berisi informasi seputar capaian keberhasilan dan hambatan pelaksanaan rencana kerja berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sistematika Penyajian

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta gambaran umum tentang kedudukan tugas pokok dan fungsi maupun struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, termasuk keberhasilan dan kegagalan, hambatan dan kendala serta permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif dan akuntabilitas keuangan

BAB IV PENUTUP

Berisikan simpulan umum mengenai capaian hasil pelaksanaan kinerja tahun 2021 serta strategi pemecahan masalah yang diperkirakan akan dapat mengatasi hambatan dan kendala yang dihadapi.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGI

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Way Kanan telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Penyusunannya telah melibatkan seluruh komponen perangkat pemerintahan pada Dinas P3APPKB Kabupaten Way Kanan yang menempatkan Renstra sebagai komitmen bersama Dinas P3APPKB beserta seluruh staf untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintah dan kelembagaan Dinas P3APPKB Kabupaten Way Kanan yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat khususnya selaku aparat terdepan dalam upaya optimalisasi kinerja Pemerintahan di Kabupaten Way Kanan. Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam dimulai dengan penetapan visi dan misi yang tidak terlepas dari visi dan misi

Kabupaten Way Kanan. Dari Visi dan misi yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, dan strategi pencapaiannya.

Visi dan Misi Pembangunan

Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Pembangunan pendidikan di Kabupaten Way Kanan ke depan harus dilaksanakan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, dengan Visi Pembangunan Kabupaten Way Kanan yaitu:

“Way Kanan Unggul dan Sejahtera”

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan “Way Kanan Unggul dan Sejahtera”, Dalam rangkan pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut :

MISI 1 Mewujudkan tatakelola Pemerintahan yang baik dengan memperkuat kelembagaan organisasi Perangkat Daerah yang didukung Aparatur Sipil Negara yangn kompeten berbasis kinerja, pelayanan publik yangng semakin baik dan dikembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik.

MISI 2 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan

dengan upaya pencegahan kerusakan lingkungan terutama Daerah tangkapan air serta meningkatkan upaya kelestarian lingkungan untuk menjaga ketersediaan air dimasa depan.

MISI 3 Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, perlindungan perempuan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, memberdayakan masyarakat miskin, perlindungan penyandang masalah sosial & lansia didukung lingkungan yang kondusif.

MISI 4 Meningkatkan perekonomian Daerah berbasis k

dengan mengembangkan potensi dan keunggulan di sektor pertanian, meningkatkan nilai tambahnya melalui industri olahan, perdagangan, jasa dan pariwisata serta memperkuat kelembagaan Koperasi dan UMKM didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai.

2.2 Tujuan dan Sasaran, Indikator sasaran Renstra dan Target Tahun 2023

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata, dalam rumusan yang spesifik, yang sedapat mungkin terukur secara kuantitatif dalam jangka waktu tahunan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu OPD berkewajiban memberikan kontribusi terhadap capaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan mendukung pencapaian Visi dan Misi 1, dan Misi 3. Diantaranya adalah Dalam rangka pencapaian visi pembangunan “Way Kanan Unggul dan Sejahtera”, maka melalui SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah menetapkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas P3AP2KB

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP Kabupaten Way Kanan	Poin	60,64
		Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP Dinas P3AP2KB	Poin	48,89
2	Meningkatnya Kualitas Hidup Anak		Indeks Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya
		Meningkatkan Implementasi Kabupaten Layak Anak	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	Poin	650
	Pertumbuhan Penduduk		Pertumbuhan Penduduk	%	0.9
		Meningkatkan Kepesertaan Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif	%	82,9
4	Meningkatnya Pembangunan Gender		Indeks Pembangunan Gender	Poin	88,27

		Meningkatkan Keberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	67,28
--	--	------------------------------------	----------------------------	------	-------

Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja Dinas P3P2KB Kabupaten Way Kanan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indicator *outcome* Pada program dan *output* pada kegiatan pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode tujuan dan target RPJMD dapat tercapai dengan paripurna. Dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan Dinas P3AP3KB Kabupaten Way Kanan tiap tahun anggaran dapat ditentukan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS P3AP2KB KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-2026
(SEBELUM PERUBAHAN)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	RUMUSAN/PENJELASAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA						SUMBER DATA
						2021	2023	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah		Nilai evaluasi SAKIP Kabupaten		Poin	58,64	59,64	60,64	61,64	62,64	63,64	Hasil Penilaian MENPANRB
		Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP Dinas P3AP2KB	Nilai SAKIP diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Way Kanan a	Poin	37,89	43,89	48,89	53,89	57,89	60,89	Hasil Penilaian Inspektorat Kab. Way Kanan
2	Meningkatnya Kualitas Hidup Anak		Indeks Kabupaten Layak Anak	Indikator KLA	Kategori	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya	Kategori dalam Penilaian KLA Kemntrian PPA
		Meningkatkan Upaya Pemenuhan Hak Anak	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah pemenuhan Hak Anak indikator KLA yang telah dilaksanakan dibagi jumlah seluruh pemenuhan hak anak dikali 100	%	50	60	70	80	90	90	Bidang PA

		Meningkatkan Upaya Perlindungan Anak	Cakupan Perlindungan Anak	Jumlah kekerasan terhadap Anak yang ditangani dibagi Jumlah kekerasan terhadap Anak yang ada dikali seratus Persen	%	100	100	100	100	100	100	SIMFONI Bidang PA
		Meningkatkan Pembinaan Tentang Hak Anak Pada Keluarga	Cakupan Keluarga Yang Telah Dibina Tentang Hak Anak	Jumlah Keluarga Yang Telah Dibina dibagi Jumlah Keluarga yang berkonsultasi (ke puspaga) dikali 100	%	5	10	15	20	25	25	Bidang PA
	Terkendalnya Pertumbuhan Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan pertambahan penduduk selama kurun waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk dihitung menurut beberapa variabel yaitu angka kelahiran, kematian	%	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	Dokumen Renstra DP3AP2KB

	Meningkatkan Pengendalian Penduduk	Presentase laju pertumbuhan Penduduk	Jumlah Penduduk tahun n dikurangi jumlah penduduk tahun sebelumnya (n-1) dibagi jumlah penduduk tahun sebelumnya(n-1) dikali 100%	%	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	Bidang DALDUK
	Meningkatkan Kepesertaan Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah peserta kb aktif dibagi jumlah PUS dikali 100%	%	81,9	82,9	82,9	83,9	83,9	83,9	Bidang KB&KS dan DALDUK
			Target Cakupan peserta KB aktif pertahun adalah sebesar 0,5% data ini diperoleh dari Laporan tahunan SIGA (Sistem Informasi Keluarga)								
	Meningkatkan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Cakupan Pembinaan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok yang dibentuk dibagi jumlah kampung kali dikali 100%	%	10	10	10	10	10	10	Bidang KB&KS dan DALDUK

				Kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga diantaranya adalah : BKB,BKL,BKR,UPPKS ,PIK-R								
4	Meningkatnya Pembangunan Gender		Indeks Pembangunan Gender	Rilis BPS	Poin	88,23	88,24	88,27	88,32	88,37	88,38	Rilis BPS
		Meningkatkan Keberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	IDG diukur dari :	Poin	65,95	66,61	67,28	67,95	68,63	69,32	Rilis BPS & Bidang PP
				1. Jumlah Perempuan di DPRD kab. Way Kanan (Jumlah perempuan DPRD Kab. Way Kanan dibagi jumlah seluruh anggota DPRD Kab. Way Kanan di kali 100%)								
				2. Jumlah Kepala Perangkat daerah Perempuan dibagi jumlah seluruh perangkat daerah dikali 100 Persen								

			3. Jumlah Perempuan Kepala keluarga di bagi jumlah kepala keluarga dikali Seratus									
	Mengurangi Kejadian Kekerasan Perempuan	Rasio Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah korban perempuan yang tertangani dan Terlaporkan	Kasus	20	15	10	5	0	0		SIMFONI dan Bidang PA

Jika melihat pada tabel 2.3 diatas, terlihat bahwa IKU Dinas P3AP2KB tidak memuat Tujuan, Sasaran tidak menuangkan indikator yang jelas juga tidak mencantumkan target selama 5 tahun yang akan dicapai. Kemudian jika diperhatikan lagi pada tujuan/sasaran Meningkatnya Kinerja Organisasi terlihat ketidakrelevanan pada tujuan dan sasaran Dinas P3AP2KB yang mengakibatkan Tugas Pokok Dinas P3AP2KB menjadi bias. Seharusnya tujuan/sasaran Meningkatnya Kinerja Organisasi tidak perlu dituangkan kedalam Tujuan dan IKU Dinas P3AP2KB dan lebih fokus pada Tugas pokok yang diampu Dinas P3AP2KB. Karena pada hakikatnya, tugas pokok tidak boleh bias dengan tugas tambahan atau bukan pokok. Kemudian untuk Peningkatan satu data itu juga bukan termasuk tujuan dan sasaran Dinas P3AP2KB melainkan diampu oleh SKPD lain. Selanjutnya untuk Tujuan Penurunan angka kemiskinan juga bukan termasuk dalam tujuan dan sasaran Dinas P3AP2KB.

Pada tahap pembedahan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mulai dari Dokumen IKU, PK sampai dengan Rencana Aksi. Terdapat kesepahaman terkait Tujuan, sasaran dan indikator pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan yang kemudian dirumuskan dan dimusyawarahkan ke masing-masing eselon atau penanggungjawab program kegiatan dengan uraian perbaikan atas IKU sebagaimana berikut :

Tabel 2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS P3AP2KB KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-2026
(SETELAH PERUBAHAN)

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS P3AP2KB KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	RUMUSAN/ PENJELASAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA					
						2021	2023	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah		Nilai evaluasi SAKIP Kabupaten		Poin	58,64	59,64	60,64	61,64	62,64	63,64
		Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP Dinas P3AP2KB	Nilai SAKIP diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Way Kanan	Poin	37,89	43,89	48,89	53,89	57,89	60,89
2	Meningkatnya Kualitas Hidup Anak		Indeks Kabupaten Layak anak (KLA)	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Pratama	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya
		Meningkatkan Implementasi Kabupaten Layak anak	Indeks Kabupaten Layak anak (KLA)	Skor Kabupaten Layak anak	Poin	580	600	650	701	710	720
3	Terkendalinya Laju Pertumbuhan		Presentase laju pertumbuhan Penduduk	Rilis BPS	%	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

	Penduduk	Meningkatkan Pengendalian Penduduk	Presentase laju pertumbuhan Penduduk								
				$r = \left(\frac{P_t}{P_0}\right)^{\frac{1}{t}} - 1$		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
		Meningkatkan Kepesertaan Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah peserta kb aktif dibagi jumlah PUS dikali 100%	%	81,9	82,9	82,9	83,9	83,9	83,9
4	Meningkatnya Pembangunan Gender		Indeks Pembangunan Gender		Poin	88,23	88,24	88,27	88,32	88,37	88,38
		Meningkatkan Keberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	Rilis BPS	Poin	65,95	66,61	67,28	67,95	68,63	69,32

2.3 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Daerah Kabupaten Way Kanan pada umumnya dan Dinas P3AP2KB pada khususnya maka tujuan Perjanjian Kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi misi dan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan serta sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan kinerja penerima amanah.

Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah dalam hal ini Kepala SKPD kepada atasan langsungnya (Bupati) dalam ruang lingkup seluruh tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja disini merupakan penentuan target kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas. Dengan adanya perjanjian kinerja maka terwujudlah kesepakatan antaran pemberi dan peneriman amanah atas kinerja terukur tertentu sesuai tugas, fungsi dan wewenang memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Dokumen Perjanjian Kinerja mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.4.1 Perjanjian Kinerja Dinas P3AP2KB Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP Dinas P3AP2KB	%	48,89
2	Meningkatkan Implementasi KLA	Indeks KLA	Poin	650
3	Meningkatkan Pengendalian Penduduk	Presentase laju pertumbuhan Penduduk	%	0,9
4	Meningkatkan Kepesertaan Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif	%	82,9
5	Meningkatkan Keberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	67,28

2.4 Rencana Kerja Tahunan

Perencanaan kinerja merupakan proses sangat penting dan harus dilakukan oleh organisasi karena dapat memberikan perspektif tentang apa yang akan dicapai ataupun dihasilkan oleh organisasi. Rencana Kinerja Tahunan digunakan untuk penyusunan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang bersangkutan karena alokasi anggaran untuk SKPD yang terbatas. Dengan adanya rencana kinerja tahunan tersebut diharapkan pengelolaan program dan kegiatan benar-benar berdaya guna dan berhasil guna. Rencana Kinerja Tahunan disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Arah Kebijakan Umum yang ditetapkan untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2023. Adapun Rencana Kinerja Tahunan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Tabel Rencana Kerja Tahunan Dinas P3AP2KB tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP Dinas P3AP2KB	%	48,89
2	Meningkatkan Implementasi KLA	Indeks KLA	Poin	650
3	Meningkatkan Pengendalian Penduduk	Presentase laju pertumbuhan Penduduk	%	0,9
4	Meningkatkan Kepesertaan Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif	%	71,97
5	Meningkatkan Keberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	67,28

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

31. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas P3AP2KB tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja, dan Penetapan Kinerja (PK) Dinas P3AP2KB, yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas P3AP2KB Tahun 2023 Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan menggunakan media formulir Pengukuran Kinerja. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu:

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik,
 maka digunakan rumus:

$$\text{Pencapaian Kinerja} = \frac{(\text{Realisasi})}{(\text{Rencana})} = 100\%$$

Tabel 3.1 Tabel Skala Pengukuran Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Nilai
1.	> 91-100	Sangat Memuaskan	AA
2.	>81-90	Memuaskan	A
3.	>71-80	Sangat Baik	BB
4.	>61-70	Baik	B
5.	>51-60	Cukup	CC
6.	>41-50	Kurang	C
7.	>31-40	Sangat Kurang	D

Sumber Data :www.esakip.menpan.go.id

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Dinas P3AP2KB

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	URAIAN	REALISASI
1	Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah			Poin	60,64		
		Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP Dinas P3AP2KB	Poin	48,89	<p>Untuk mencapai target nilai sakip Dinas P3AP2Kb yang kami lakukan yaitu pemenuhan Dokumen SAKIP yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen LKJ Tahun 2023 2. Dokumen Renstra Tahun 2023 - 2026 3. Dokumen IKU Tahun 2021-2026 4. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 5. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2023 6. Dokumen Rencana Aksi Tahun 2023 7. Dokumen Rencana Evaluasi Rencana aksi Tahun 2023 8. Cascading Tahun 2023 	Dalam Proses Penilaian Oleh Inspektorat

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	URAIAN	REALISASI
2	Meningkatnya Kualitas Hidup Anak		Indeks Kabupaten Layak Anak	Kategori	Pratama		
		Meningkatkan Implementasi KLA	Indeks Kabupaten Layak Anak	%	650	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Forum Anak daerah Tingkat Kabupaten Way Kanan 2. Pembentukan Forum Anak daerah Tingkat Kecamatan dan telah terbentuk 15 Kecamatan 3. Pembentukan Forum Anak daerah Tingkat Kampung, Sudah terbentuk di 150 kampung 4. Adanya Masjid Ramah anak di 15 Kecamatan 5. Sosialisai Stop kekerasan anak bekerja sama dengan TP.PKK Kabupaten way Kanan dan seluruh jajaran Pemangku kebijakan hingga tingkat kampung 2. Kampanye melalu senam Sentuhan 3. Melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan pada anak (ada 25 	Realisasi capaian kinerja padatahun 2023 sebesar 110,64 %

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	URAIAN	REALISASI
3	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,9		
		Meningkatkan Kepesertaan Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif	%	82,9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan Kb keliling 2. Menyampaikan KIE di 15 Kecamatan 3. Pendistribusian ALOKON 4. Adanya Kader PPKBD dan SUB PPKBD 5. Tersedianya Tenaga penyuluh (22 orang) 6. Pembinaan Kelompok Tribina Melalui ketahanan Keluarga (sudah terbentuk 25 kelompok tribina di 25 Kampung) 7. Penyelenggaraan HARGANAS 8. Stanting 	Realisasi capaian kinerja padatahun 2023 sebesar 71,97% (86,81%)
4	Meningkatnya Pembangu		IndeksPembangu nan Gender	Poin	88,24		

	nan Gender						
		Meningkatkan Keberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gendr	Poin	67,28	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan pada organisasi wanita dan politik (6 Organisasi Wanita) 2. Pembinaan DRPPA 3. Peningkatan ekonomi Kepala Keluarga Perempuan Miskin (5 Kepala Keluarga) 4. Pelaksanaan kegiatan Pengarusutamaan Gender pada 5. SKPD 6. Sosialisai Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak bekerja sama dengan TP.PKK Kabupaten way Kanan dan seluruh jajaran Pemangku kebijakan hingga tingkat kampung 7. Kampanye melalu senam Three ends 8. Melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan pada anak (ada 5 korban kekerasan yang di damping) 	Menunggu rilis BPS

EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

Pencapaian, Evaluasi dan Monitoring adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses pencapaian sebuah kinerja. Maksud dilakukan evaluasi kinerja adalah agar organisasi dapat mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan dimasa yang akan datang. Hasil Analisis terhadap Pengukuran Capaian Kinerja yaitu sebagai berikut : ***Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah*** maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana/Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} * 100\%$$

**Tabel 3.4 Tabel Capaian Kinerja
Dinas P3AP2KB Kab. Way Kanan**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI
1	Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP Kabupaten Way Kanan	Poin	60,64	
		Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP Dinas P3AP2KB	Poin	48,89	Sedang Proses Evaluasi
2	Meningkatnya Kualitas Hidup Anak		Indeks Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Nindya
		Meningkatkan Implementasi KLA	Indeks KLA	Poin	650	718
3	Terkendalnya Pertumbuhan Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,9	1,22
		Meningkatkan Kepesertaan Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif	%	82,9	71,97

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI
4	Meningkatnya Pembangunan Gender		Indeks Pembangunan Gender	Poin	88,27	
		Meningkatkan Keberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	67,28	

1.1 Indikator Kinerja

Pengukuran kinerja kegiatan dan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan dalam tahun anggaran 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan pengukuran kinerja yang tertuang dalam Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) tahun 2021. Pengukuran kinerja dengan melihat capaian kinerja merupakan bentuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan unit kerja terkait.

Kelompok indikator kinerja yang akan dilakukan pengukuran adalah:

1. Indikator kinerja masukan (*input*) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Indikator kinerja keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik fisik maupun non fisik.

3. Indikator kinerja hasil (*outcome*) merupakan indikator kinerja yang menunjukkan berfungsinya keluaran (*output*).

Tabel 3.1 Rincian Penilaian Rentang Capaian Kategori Capaian Indikator Sasaran

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih besar dari 100 %	Sangat baik
II	> 90 % sampai dengan 100 %	Baik
III	>70 % sampai dengan 90 %	Cukup
IV	> 55 % sampai dengan 70 %	Kurang
V	> 0 % sampai dengan 55 %	Sangat kurang
VI	Sama dengan 0	Belum terukur

1.2 Capaian Kinerja Indikator sasaran Organisasi

Konsep-konsep pengukuran kinerja organisasi (*key performance indicators*) telah berkembang sejalan dengan semangat perubahan untuk memperbaiki kinerja organisasi. Semangat perubahan dimaksud adalah pola orientasi manajemen dari pola yang berorientasi pada masukan (*input*) kepada pola yang berorientasi hasil, manfaat dan dampak kegiatan (*output, outcomes* dan *benefit*).

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Tujuan dalam penetapan IKU adalah untuk; 1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; 2) Untuk

memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Untuk capaian kinerja Organisasi diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran strategi yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Pengukuran capaian kinerja sasaran dilakukan dengan cara menghitung capaian melalui formulasi yang telah ditetapkan. Untuk capaian dari masing-masing sasaran

1.3 Pengukuran Pencapaian Kinerja

1.3.1 Pengukuran Kinerja Kegiatan

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten telah melaksanakan 10 buah program dan 37 (Tiga Puluh tujuh) buah kegiatan. Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan yang dilakukan maka dari 37 buah kegiatan sudah dilaksanakan sesuai target keluaran (output) kegiatan dengan tingkat capaian realisasi keluaran (output) 100%, hanya ada beberapa target keluaran (output) indikator kinerja kegiatan yang tidak terealisasi secara keseluruhan.

1.3.2 Pengukuran Pencapaian Sasaran

Pengukuran pencapaian sasaran pembangunan bidang keluarga berencana, pengendalian penduduk, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan diukur dengan menggunakan indikator-indikator pembangunan pendidikan

yang mengacu pada indikator kinerja utama bidang keluarga berencana, pengendalian penduduk, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Pada Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah menetapkan sebanyak 9 indikator kinerja sasaran yang akan dicapai oleh SKPD. Uraian atas analisis capaian kinerja pada 5 sasaran strategis dan 5 indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut: dan indikator sasaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Organisasi sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatkan kualitas SAKIP SKPD

Indikator kinerja sasaran Meningkatkan kualitas SAKIP SKPD adalah Nilai Sakip Dinas P3AP2KB didukung dengan adanya program penunjang urusan pemerintah indikator kinerjanya telah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas P3AP2KB.

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai SAKIP DINAS P3AP2KB	POINT	60,71	43,89	Proses Evaluasi	-

Berdasarkan hasil Evaluasi atas implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 yang dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), berdasarkan hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya walaupun masih terdapat beberapa catatan untuk perbaikan ke depan. Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 memperoleh nilai sebesar 60,71 dengan Predikat B dan Interpretasi Baik, menunjukkan gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja,

khususnya pada unit kerja utama. Akan tetapi masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon II /unit kerja.

Berdasarkan informasi dan dokumen yang disampaikan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan telah menindaklanjuti sebagian dari rekomendasi Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2021, diantaranya yaitu:

1. Telah Berupaya Menyusun sasaran dan indikator sasaran yang menggambarkan *Core Business* pada renstra/rencana kinerja tahunan yang berorientasi hasil, dengan memenuhi unsur berkualitas outcome.
2. Menyusun Rencana Aksi atas kinerja yang mencantumkan target secara periodik.
3. Menyusun mekanisme pengumpulan data kinerja.
4. Menyusun laporan kinerja yang menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain

Sementara itu, masih terdapat beberapa rekomendasi yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti dan masih dalam proses tindak lanjut, yaitu terkait:

1. Pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengumpulan dan pengukurandata kinerja serta dalam evaluasi akuntabilitas kinerja.
2. Menyusun indikator kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerjaorganisasi/atasannya.
3. Pelaksanaan evaluasi internal secara berjenjang.
4. Melakukan monitor pencapaian atas target kinerja eselon III dan IV.

Secara umum penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2022 sebesar 60,71 (kategori B) naik 16,89 poin dari nilai evaluasi tahun sebelumnya yaitu 43,82 (kategori C), sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

No	Komponen yang dinilai	Hasil Evaluasi Tahun 2021	Hasil Evaluasi Tahun 2022
1	Perencanaan Kinerja	18,63	22,20
2	Pengukuran Kinerja	10,94	15,90
3	Pelaporan Kinerja	7,74	9,60
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	6,51	13,00
Jumlah		43,82	60,71
Kategori		C	B

Dari hasil evaluasi, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perbaikan, yaitu:

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

- a. Kualitas rumusan sasaran **belum** seluruhnya berorientasi hasil. Hal ini dilihat dari rumusan sasaran berikut:
 1. "Meningkatkan Upaya Perlindungan Anak".
Upaya Perlindungan Anak, belum menggambarkan kondisi/ hasil yang akan dicapai.
 2. "Meningkatkan Pengendalian Penduduk".
Pengendalian Penduduk masih bersifat proses, belum menggambarkan kondisi/ hasil yang akan dicapai.
 3. "Meningkatkan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera".
Pemberdayaan Keluarga Sejahtera masih bersifat proses, belum menggambarkan kondisi/ hasil yang akan dicapai.
- b. Indikator kinerja sasaran belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART (*Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timebond*). Hal ini dapat dilihat dari indikator kinerja
 1. "Meningkatkan Upaya Pemenuhan Hak Anak".
Tidak relevan dengan formulasi pengukuran, bahwa yang akan diukur adalah jenis pemenuhan hak anak bukan jumlah forum anak yang dibentuk.
 2. "Meningkatkan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera".
Tidak relevan dengan formulasi pengukuran, bahwa yang akan diukur adalah Peningkatan Keluarga Sejahtera bukan Pembinaan Keluarga Sejahtera.

- c. Belum seluruh Indikator Kinerja Utama menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai. Hal ini dilihat dari indikator kinerja "Cakupan Pembinaan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga", yang diukur dari Jumlah Kelompok yang dibina dibagi Jumlah Kelompok yang ada dikali 100%. Indikator kinerja tersebut belum menggambarkan kondisi kinerja utama yang seharusnya dicapai karena masih berupa output yang seharusnya menjadi indikator kinerja pada level eselon III/ IV. Sementara pada level eselon II, ukuran/ indikator kinerja seharusnya dapat menggambarkan kondisi kinerja utama dari Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
- d. Target kinerja tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan belum sepenuhnya memperhatikan apakah target kinerja tersebut menantang dan realistis. Hal ini dilihat dari target kinerja tujuan dan sasaran strategis berikut:
 - 1. Target kinerja dari sasaran strategis "Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah", dengan indikator kinerja "Nilai SAKIP Dinas P3AP2KB", tidak menantang dikarenakan nilai SAKIP yang diharapkan yaitu predikat "B" (Di atas poin 60 sampai dengan 70), namun poin target yang ditetapkan dibawah range nilai predikat "B" yaitu 43,89 poin.
 - 2. Target kinerja dari sasaran strategis "Meningkatnya Pengendalian Penduduk" dengan indikator kinerja "Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk", tidak menantang dan realistis dikarenakan laju pertumbuhan penduduk pada tahun N-1 sebesar 0,85% telah melebihi target sebesar 0,90% serta target yang ditetapkan sampai akhir periode RENSTRA, tidak menunjukkan peningkatan kinerja.
- e. Perencanaan kinerja belum dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
- f. Terdapat perbaikan/ penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja, akan tetapi pada perubahan/ revisi dokumen perencanaan, tidak disajikan informasi perbaikan yang dilakukan (perbandingan sebelum dan sesudah perubahan), analisis yang mendasari dilakukannya perubahan, serta kondisi

lebih baik yang akan diperoleh dengan melakukan perubahan dokumen perencanaan tersebut.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

- a. Dinas P3AP2KB telah menyusun SOP pengumpulan data kinerja, akan tetapi belum membuat SOP Pengukuran data kinerja.
- b. Belum terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja pada beberapa indikator kinerja sasaran. Hal ini dapat dilihat dari indikator kinerja "Cakupan Pemenuhan Hak Anak" dengan formulasi pengukuran: $(\text{Jumlah Forum Anak yang dibentuk} / \text{jumlah Kampung}) \times 100\%$.

Belum terdapat definisi operasional yang cukup jelas atas kinerja tersebut, apakah Pemenuhan Hak anak menjadi tolak ukur kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas P3AP2KB atau merupakan tugas tambahan. Dalam penjelasan yang dimuat dalam Laporan Kinerja, belum menggambarkan jenis pemenuhan hak anak yang menjadi tolak ukur kinerja Dinas P3AP2KB.

- c. Pemantauan atas pengukuran kinerja secara berjenjang belum dilakukan pada setiap level organisasi, masih terbatas pada eselon II dan belum menjadi perhatian setiap unit kerja dan seluruh pegawai. Kondisi tersebut dapat dilihat dari belum dilakukannya pengukuran kinerja berjenjang pada masing-masing level/ unit kerja
- d. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (aplikasi).
- e. Monitoring evaluasi triwulan yang disusun belum memuat analisis capaian, hambatan dan solusi perbaikan atas penyesuaian strategi.
- f. Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah memuat realisasi anggaran, tetapi belum terdapat informasi efisiensi anggaran.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

- a. Dokumen Laporan Kinerja belum disusun sesuai dengan PermenPAN RB nomor 53 tahun 2014;
- b. Laporan Kinerja belum menyajikan informasi efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja;
- c. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai. Hal tersebut dapat dilihat dari belum seluruhnya pejabat struktural yang ada membuat dan melaporkan perjanjian kinerja;
- d. Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. Hal tersebut dapat dilihat dari belum dilakukannya pengukuran kinerja secara berjenjang pada setiap level/ unit kerja serta belum dilakukannya penilaian atas Sasaran Kinerja Pegawai yang dipantau secara berkala.

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi);
- b. Rekomendasi atas hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP belum ditindaklanjuti secara keseluruhan;
- c. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum menggambarkan secara lengkap mengenai capaian realisasi, faktor pendorong, faktor hambatan dan Rekomendasi. Kondisi tersebut mengakibatkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja;
- d. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan pada seluruh unit kerja masih terbatas pada eselon II.

b. Rekomendasi atas Catatan Kekurangan untuk Perbaikan

Terhadap hasil evaluasi tersebut di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

1) Terkait Hasil Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

- a. Melakukan pengkajian ulang terkait rumusan sasaran agar lebih berkualitas hasil, khususnya pada rumusan sasaran “Meningkatkan Upaya Perlindungan Anak”, “Meningkatkan Pengendalian Penduduk”, dan “Meningkatkan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera”;
- b. Melakukan pengkajian ulang terkait indikator kinerja sasaran agar dapat memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timebond). Dalam merumuskan indikator kinerja agar dapat memperhatikan juga keselarasannya dengan rumusan sasaran dan formulasi pengukuran yang digunakan;
- c. Melakukan pengkajian ulang terhadap indikator kinerja “Cakupan Pembinaan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga”, agar dapat menggambarkan kondisi kinerja utama yang seharusnya dicapai, yaitu lebih mengarah kepada pemanfaatan output;
- d. Mereviu kembali target kinerja tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan agar memenuhi kualitas target kinerja yang baik, yaitu menantang, dapat dicapai dan realistis. Khususnya berkenaan dengan target kinerja dari indikator kinerja “Nilai SAKIP Dinas P3AP2KB” dan “Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk”. target kinerja dari indikator kinerja “Nilai SAKIP Dinas P3AP2KB” agar dapat disesuaikan poinnya dengan predikat yang diharapkan. Dan target kinerja dari indikator kinerja “Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk” yang ditetapkan agar dapat memberikan Informasi yang jelas mengenai capaian target yang akan dicapai (target menurun atau target meningkat);
- e. Memperbaiki dokumen *Crosscutting* dari perencanaan kinerja agar dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang saling berkaitan/ beririsan;
- f. Saat melakukan perbaikan/ penyempurnaan dokumen perencanaan agar dapat menyajikan informasi perbaikan yang dilakukan (perbandingan sebelum dan sesudah perubahan), analisis yang mendasari dilakukannya perubahan, serta kondisi lebih baik yang akan diperoleh dengan melakukan perubahan/ penyempurnaan dokumen perencanaan tersebut.

2) Terkait Hasil Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

- a. Menyusun SOP Pengukuran data kinerja;
- b. Menyusun defisini operasional yang jelas atas kinerja dari indikator kinerja sasaran "Cakupan Pemenuhan Hak Anak" sesuai dengan fungsi Dinas P3AP2KB;
- c. Melakukan pemantauan atas pengukuran kinerja secara berjenjang setiap level organisasi tidak terbatas pada eselon II;
- d. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja agar dapat memanfaatkan Teknologi Informasi (aplikasi);
- e. Membuat laporan monitoring evaluasi triwulan yang memuat analisis capaian, hambatan dan solusi perbaikan atas penyesuaian strategi;
- f. Membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang memuat informasi efisiensi anggaran;

3) Terkait Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

- a. Menyusun Laporan Kinerja belum disusun sesuai dengan PermenPAN RB nomor 53 tahun 2014;
- b. Menyajikan informasi efisiensi didalam laporan kinerja atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
- c. Penyajian informasi dalam laporan kinerja agar dapat menjadi kepedulian seluruh pegawai, yang dibuktikan dengan dilakukannya penilaian atas Sasaran Kinerja Pegawai secara berjenjang dan dilakukan secara berkala,
- d. Informasi dalam laporan kinerja agar dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi, yang dibuktikan dengan dilakukannya pengukuran kinerja secara berjenjang pada setiap level/ unit kerja dan dilakukannya penilaian atas Sasaran Kinerja Pegawai yang dipantau secara berkala.

4) Terkait Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dapat dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi);

- b. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil Evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh APIP;
- c. Menyusun Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang menggambarkan secara lengkap mengenai capaian realisasi, faktor pendorong, faktor hambatan dan Rekomendasi;
- d. Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada seluruh unit kerja.

Secara umum, hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan berada pada kategori Baik, menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Akan tetapi masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja Pada tahun 2023, Program Kegiatan pada Dinas P3AP2KB sebagai berikut :

Tabel 3.2.1.1 Tabel Program dan Kegiatan
Pendukung Dokumen SAKIP DISP3AP2KB Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5. Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 6. Penyusunan Pelaporan & Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

2. Sasaran : Meningkatkan Implementasi Kabupaten Layak anak (KLA)

KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan (Perpres 25/2021+ PermenPPPA 12/2022) adapun Tujuan Penyelenggaraan KLA adalah:

- 1. Meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak**
- 2. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan anak dalam menyelenggarakan KLA**

sasaran Meningkatkan Implementasi Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan indikator Skor Penilaian KLA maka Point yang dicapai yaitu 718 Poin dari Target 650 Poin atau tercapai 110,46%, ditahun 2023 Kabupaten Way Kanan telah Memperoleh Penghargaan Kabupaten Layak Anak dengan Kategori Nindya. Hasil tersebut diperoleh dari Skor Penilaian dari 5 Klaster KLA.

Sebagai berikut :

NO	KLASTER/INDIKATOR	SKOR MAXIMAL	TARGET POIN IKU 2024	OPD PENANGGUNG JAWAB
I	KELEMBAGAAN	164	148	
1	Peraturan/Kebijakan Daerah tentang KLA - Perda KLA - Peraturan/kebijakan terkait 24 indikator - Anggaran 24 indikator	96	92	OPD / Instansi vertikal terkait KLA
2	Penguatan Kelembagaan KLA - Gugus Tugas KLA - RAD KLA - Profil KLA - KIE & Publikasi KLA	36	30	Dinas P3APPKB, Bappeda
3	Peran LM, DU, MM dalam Pemenuhan Hak & Perlindungan Khusus Anak	32	26	OPD/Instansi Vertikal terkait KLA

NO	KLASTER/INDIKATOR	SKOR MAX	TARGET POIN IKU 2024	OPD P. JAWAB
II	Klaster I : Hak Sipil & Kebebasan	115	80	
4	Anak yg diregistrasi & yg memiliki Kutipan Akta Kelahiran - Anak diregistrasi, dan mendapat Kutipan Akte Kelahiran - KIA - SDM dilatih KHA - Kemitraan PD dalam percepatan kepemilikan Akte, KIA - Inovasi	15	12	Dinas Dukcapil
5	Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak	45	25	Dinas

NO	KLASTER/INDIKATOR	SKOR MAX	TARGET POIN IKU 2024	OPD P. JAWAB
III	Klaster II : Lingkungan Keluarga & Pengasuhan Alternatif	115	94	
7	Pencegahan Perkawinan Anak <ul style="list-style-type: none"> - Data perkawinan anak - Kemitraan PD dalam pencegahan & penanganan perkawinan anak - Inovasi 	36	25	Dinas P3APPKB, Dinsos, Dinkes, Disdik, Kemenag PA
8	Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Ortu/Keluarga <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah layanan (Puspaga, BKB, BKR, LK3) - Lembaga layanan pengasuhan terstandarisasi - SDM dilatih KHA - Kemitraan PD dalam penyediaan layanan pengasuhan - Inovasi 	45	30	Dinas P3APPKB, Dinsos
9	PAUD HI Gugus Tugas PAUD HI, SDM dilatih KHA, kemitraan PD dalam PAUD HI, inovasi	13	8	Dinas Pendidikan

NO	KLASTER/INDIKATOR	SKOR MAX	TARGET POIN IKU 2024	OPD P. JAWAB
III	Klaster II : Lingkungan Keluarga & Pengasuhan Alternatif	115	94	
10	Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Lembaga pengasuhan alternative (LKSA, Pondok Pesantren, sekolah berasrama) - SDM dilatih KHA - Kemitraan PD dalam pencegahan & penanganan perkawinan anak - Inovasi 	27	11	Dinsos, Kemenag, Dinas Pendidikan
11	Ketersediaan Infrastruktur (Sarana & Prasarana) Ramah Anak di Ruang Publik <ul style="list-style-type: none"> - Ruang Bermain Anak (RBA terstandarisasi, SDM dilatih KHA) - Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah /RASS (jumlah program RASS, SDM dilatih KHA, inovasi) 	35	20	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan

NO	KLASTER/INDIKATOR	SKOR MAX	TARGET POIN IKU 2024	OPD P. JAWAB
IV	Klaster III : Kesehatan Dasar & Kesejahteraan	150	135	
12	Persalinan di Fasilitas Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Persalinan di fasyankes, cakupan buku KIA, imunisasi dasar, AKI, AKB - Kemitraan PD dalam mencegah AKI, AKB - Inovasi 	23	21	Dinas Kesehatan
13	Status Gizi Balita <ul style="list-style-type: none"> - Persentase anak dengan masalah stunting, gizi kurang, gizi lebih - Ada tim penanganan masalah gizi - Kemitraan PD dalam pencegahan & penanganan masalah gizi - Inovasi 	20	18	Dinas Kesehatan
14	Pemberian Makan pada Bayi dan Anak < 2 Th (PMBA) Cakupan ASI eksklusif, IMD, bayi < 6 bulan menerima MPASI, ruang laktasi, kemitraan PD dalam PMBA, inovasi	32	28	Dinas Kesehatan

NO	KLASTER/INDIKATOR	SKOR MAX	TARGET POIN IKU 2024	OPD P. JAWAB
IV	Klaster III : Kesehatan Dasar & Kesejahteraan	150	135	
15	Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Puskesmas Ramah Anak/PRA - PRA terstandarisasi - SDM dilatih KHA - Kemitraan PD dalam pengembangan PRA - Inovasi 	20	18	Dinas Kesehatan
16	Lingkungan Sehat (Akses Air Minum & Sanitasi yang Layak) <ul style="list-style-type: none"> - Persentase rumah tangga memiliki akses air minum layak, sanitasi yang layak - Kemitraan PD dalam penyediaan air minum & sarana sanitasi - Inovasi 	25	42	Dinas Kesehatan
17	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) & Larangan Iklan, Promosi, & Sponsor (IPS) Rokok Perda KTR, cakupan KTR, kemitraan PD dalam pengelolaan KTR & pengawasan IPS, inovasi	30	14	Dinas Kesehatan

NO	KLASTER/INDIKATOR	SKOR MAX	TARGET POIN IKU 2024	OPD P. JAWAB
V	Klaster IV : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, & Kegiatan Budaya	110	75	
18	Wajib Belajar 12 Tahun <ul style="list-style-type: none"> - Upaya menangani anak putus sekolah - Kemitraan PD dalam mencegah & menangani anak putus sekolah & anak tidak sekolah - Inovasi 	24	18	Dinas Pendidikan, Kemenag
19	Sekolah (Satuan Pendidikan) Ramah Anak (SRA) <ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Bersama SRA - Persentase SRA & Persentase SRA terstandarisasi - SDM dilatih KHA - Kemitraan PD dalam pendampingan & monev SRA - Inovasi pengembangan SRA 	51	42	Dinas Pendidikan, Kemenag
20	Ketersediaan Fasilitas utk Kegiatan Budaya, Kreativitas, & Rekreatif yang Ramah Anak Pusat Kreativitas Anak (PKA) & Rumah Inadah Ramah Anak (RIRA)	35	15	Dinas P3APPKB, Dinas Porapar, Kemenag

NO	KLASTER/INDIKATOR	SKOR MAX	TARGET POIN IKU 2024	OPD P. JAWAB
VI	Klaster V : Perlindungan Khusus	205	94	
22. a	Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS <ul style="list-style-type: none"> - Anak korban Pornografi, NAPZA, HIV yang terlayani - Kemitraan PD dalam pencegahan & penanganan anak korban pornografi, NAPZA, HIV/AIDS 	17	7	Dinas P3APPKB, Dinkes, Dinsos, BNNK, UPT PPA
22. b	Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana & Konflik Fasilitas bagi anak korban bencana & konflik, early morning system, jalur evakuasi ramah anak, kemitraan PD dalam pencegahan & penanganan anak korban bencana & konflik	18	9	BPBD
23. a	Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi Jumlah anak disabilitas, lembaga pengasuhan disabilitas, sarana & prasarana disabilitas, bentuk pemberian kesempatan, partisipasi, & apresiasi bagi anak penyandang disabilitas, sistem perlindungan anak utk anak kelompok minoritas & terisolir	23	12	Dinas Sosial

NO	KLASTER/INDIKATOR	SKOR MAX	TARGET POIN IKU 2024	OPD P. JAWAB
VI	Klaster V : Perlindungan Khusus	205	94	
21.	Pencegahan & Perlindungan Khusus	83	37	Dinas P3APPKB, Dinkes, Dinsos, BNNK, BPBD, Dinas Nakertrans, UPT PPA
a	Mekanisme movev perlindungan khusus, SDM terlatih, penguatan dan pengembangan Lembaga layanan, Lembaga layanan yang dibentuk pemerintah dan masyarakat			
21	Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan & Eksploitasi	17	8	Dinas P3APPKB, Dinkes, Dinsos, BNNK, BPBD, Dinas Nakertrans, UPT PPA
b	Jumlah anak korban kekerasan & eksploitasi mendapatkan layanan, kemitraan PD dalam pencegahan & penanganan anak korban kekerasan & eksploitasi			
21	Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) & Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (BPTA)	22	14	Dinas Nakertrans
c	Jumlah PA & penanganannya, upaya pengawasan PA, pencatatan & pelaporan, kemitraan PD dalam pencegahan & penarikan PA			

NO	KLASTER/INDIKATOR	SKOR MAX	TARGET POIN IKU 2024	OPD P. JAWAB
VI	Klaster V : Perlindungan Khusus	205	94	
22.	Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS	17	7	Dinas P3APPKB, Dinkes, Dinsos, BNNK, UPT PPA
a	- Anak korban Pornografi, NAPZA, HIV yang terlayani - Kemitraan PD dalam pencegahan & penanganan anak korban pornografi, NAPZA, HIV/AIDS			
22	Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana & Konflik	18	9	BPBD
b	Fasilitas bagi anak korban bencana & konflik, early morning system, jalur evakuasi ramah anak, kemitraan PD dalam pencegahan & penanganan anak korban bencana & konflik			
23	Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi	23	12	Dinas Sosial
a	Jumlah anak disabilitas, lembaga pengasuhan disabilitas, sarana & prasarana disabilitas, bentuk pemberian kesempatan, partisipasi, & apresiasi bagi anak penyandang disabilitas, sistem perlindungan anak utk anak kelompok minoritas & terisolir			

NO	KLASTER/INDIKATOR	SKOR MAX	TARGET POIN IKU 2024	OPD P. JAWAB
VI	Klaster V : Perlindungan Khusus	205	94	
23. b	Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang - Sistem pencegahan & penanganan anak dg perilaku sosial menyimpang	4	3	Dinas Sosial, Dinas P3APPKB
24 b	Penyelesaian Kasus ABH melalui Diversi (khusus Pelaku) Jumlah kasus ABH yang dilakukan diversi di tingkat penyidikan, penuntutan, dan di pengadilan, dan jumlah ABH yang mendapat layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial	14	1	Polres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Dinas Sosial
24 b	Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme & Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dg kondisi orang tuanya Mekanisme & program pencegahan & penanganan anak terpapar radikalisme & terorisme	7	3	Badan Kesbangpol

NO	KLASTER/INDIKATOR	SKOR MAX	TARGET POIN IKU 2024	OPD P. JAWAB
VII	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK	100	75	
25	Kecamatan Layak Anak (KELANA) FAD Kecamatan; kelompok olahraga/kesenian anak, mekanisme pencegahan & respon cepat penanganan korban kekerasan anak; persentase kepemilikan Akte Kelahiran, tidak ada perkawinan anak; tidak ada gizi buruk, gizi lebih, gizi kurang, stunting; persentase pendidikan formal/non formal; ruang baca anak; kelompok konsultasi keluarga; KTR; RBA; Profil Anak Kecamatan dg data terpilah memuat semua indikator kelana	21	16	Kecamatan, OPD terkait KLA
26	Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA) Persentase desa memiliki peraturan desa ttg perlindungan anak, memiliki anggaran utk perlindungan anak, FAD desa, kelompok kesenian/olahraga anak, capaian Akte Kelahiran, tidak ada perkawinan anak, tidak memiliki kasus anak dg gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, stunting, , persentase anak mendapat Pendidikan formal/non formal; ruang baca anak, konsultasi keluarga, KTR, RBA, PAUD HI, PATBM, Profil Anak Desa dg data terpilah	79	59	Kampung/ Kelurahan terkait KLA



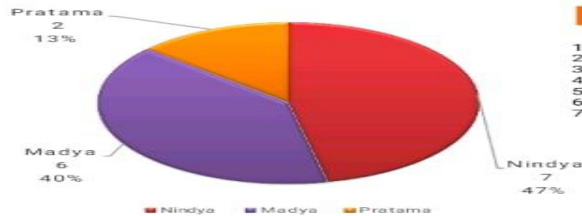
Perolehan KLA Provinsi Lampung Tahun 2023

Pratama

1. Kabupaten Pesisir Barat
2. Kabupaten Mesuji

Madya

1. Kabupaten Pesawaran
2. Kabupaten Lampung Tengah
3. Kabupaten Lampung Utara
4. Kabupaten Lampung Barat
5. Kabupaten Pringsewu
6. Kabupaten Tulang Bawang



Nindya

1. Kabupaten Lampung Selatan
2. Kabupaten Lampung Timur
3. Kota Metro
4. Kabupaten Tanggamus
5. Kota Bandar Lampung
6. Kabupaten Tulangbawang
7. Kabupaten Way Kanan

KLA KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2023

EVALUASI MANDIRI (EM)
VERIFIKASI FINAL
KATEGORI

: 941,35
: 718,06
: NINDYA

Nilai Kelembagaan Kab. Way Kanan



Nilai Klaster I Kab. Way Kanan



Dari Diagram diatas dapat terlihat pencapaian kinerja pada sasaran Meningkatkan Implementasi Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2023 sebesar 718,06 Poin dengan Ketegori Nindya . pada Tahun 2022 Skor Kabupaten Layak anak memperoleh Skor 706 Nindya. Dimana ada kenaikan sebesar 12,06 poin.

Adapun Upaya yang telah dilakukan untuk dapat menaikan skor KLA diantaranya adalah :

1. Studi Tiru KLA ke Kabupaten Bantul (Predikat Utama) Secara garis besar apa yang dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kab. Bantul juga sudah dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kab. Way Kanan hanya saja belum terupload seluruhnya. Banyak kegiatan yang sudah dilakukan belum disertai bukti /dokumen pendukung.
2. Kab. Way Kanan telah memiliki 1 PRA terstandarisasi Ramah Anak oleh Kementerian

PP & PA di tahun 2023

3. Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA dipimpin oleh Sekda Kab. Way Kanan selaku Ketua Gugus Tugas KLA Kab. Way Kanan dengan mengundang semua OPD / instansi Vertikal yang terlibat KLA untuk membedah klaster/indikator. Narasumber berasal dari Verifikator KLA Provinsi Lampung. Hasil yang diharapkan OPD/Instansi Vertikal dapat memberikan data dukung yang benar dan sesuai dengan pertanyaan yang ada, sehingga pada waktu Verifikasi Administrasi oleh Tim Verifikator di Provinsi score/poin nya tidak turun.

Presentase Penangan Kasus Kekerasan terhadap anak Sebanyak 28 Kasus Yang tertangani dari 25 Laporan Kasus artinya ada sebesar 100 % Kasus Kekerasan terhada anak tertangani. Hal-hal yang telah dilaksanakan diantaranya :

1. Sosialisai Stop kekerasan anak bekerja sama dengan TP.PKK Kabupaten way Kanan dan seluruh jajaran Pemangku kebijakan hingga tingkat kampung
2. Kampanye melalu senam Sentuhan
3. Melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan pada anak (ada 25 korban kekerasan yang di damping
4. Penjangkauan Korban Kekerasan terhadap anak.

Standar Pelayanan Minimal

UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak

Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana

NO	PELAYANAN	URAIAN PELAYANAN	TARGET
1.	Cakupan Pengaduan Masyarakat	Fungsi layanan untuk menerima laporan masyarakat atas kasus perempuan dan anak yang diterima oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.	100%

2.	Cakupan Penjangkauan Kasus	Cakupan fungsi layanan untuk memenuhi hak dan kebutuhan seluruh penerima manfaat yang sedang dilayani oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dengan cara menyediakan, merujuk atau melimpahkan	100%
3.	Cakupan Pengelolaan Kasus	Cakupan fungsi layanan untuk memenuhi hak dan kebutuhan seluruh penerima manfaat yang sedang dilayani oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dengan cara menyediakan, merujuk atau melimpahkan	100%
4.	Cakupan Penampungan Sementara	Cakupan fungsi layanan untuk menyediakan atau memberikan akses tempat perlindungan sementara yang mengutamakan keamanan dan keselamatan serta menyediakan fasilitas sandang, pangan dan pendukung kebutuhan penerima manfaat (Korban) yang benar-benar membutuhkan perlindungan dan keamanan ditunjukkan dengan keterangan Kepolisian	100%
5.	Cakupan Mediasi	Cakupan fungsi layanan dengan cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh moderator	100%
6.	Cakupan Pendampingan Korban	Cakupan fungsi layanan yang diberikan oleh pendamping UPT Perlindungan Perempuan dan Anak kepada setiap penerima manfaat secara langsung untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan korban	100%

Data Capaian Layanan Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan Komprehensif di Kabupaten/Kota se Kabupaten Way Kanantahun 2022-2023, dalam tabel dibawah ini :

		Kasus	Korban	Terlayani
--	--	-------	--------	-----------

No.	Unit / Instansi		Anak	Perempuan	Anak	Perempuan	Anak %	% Perempuan	% Total
1.	Baradatu	3	2	1	2	1	100	100	100
2.	Gunung Labuhan	2	2	0	2	0	100	0	100
3.	Way Tuba	0	0	0	0	0	0	0	100
4.	Bumi Agung	3	3	0	3	0	100	0	100
5.	Buay Bahuga	2	1	1	1	1	100	100	100
6.	Bahuga	1	1	0	1	0	100	0	100
7.	Kasui	3	1	2	1	2	100	100	100
8.	Rebang Tangkas	3	3	0	3	0	100	0	100
9.	Banjit	0	0	0	0	0	0	0	100
10.	Blambangan Umpu	4	2	2	2	2	100	100	0
11.	Negeri Agung	9	9	0	9	0	100	0	100
12.	Umpu Semenguk	2	2	0	2	0	100	0	100
13.	Pakuan Ratu	4	4	0	4	0	100	0	100
14.	Negeri Besar	1	1	0	1	0	100	0	
15.	Negara Batin	4	3	1	3	1	100	100	100
TOTAL		36	31	5	31	5	100	100	100

Sumber Data : UPT PPA Kabupaten Way Kanan 2023

Dari tabel di atas jumlah kekerasan terhadap anak pada tahun 2022 berjumlah 4 orang dan jumlah kekerasan terhadap anak dan perempuan di tahun 2023 berjumlah 32 orang sehingga pada tahun 2023 mengalami kenaikan kekerasan terhadap anak dan perempuan sebesar 87,5 % .

Dengan demikian akan ditingkatkannya kualitas hidup anak dengan sasaran meningkatkan implementasi Kabupaten Layak Anak melalui indikator Indeks Kabupaten Layak Anak dengan kategori capaian Kabupaten Layak Anak dengan melakukan evaluasi kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

Bentuk kegiatan yang dilakukan :

1. Pelatihan & Penguatan Kader PATBM sebanyak 72 orang yang berasal dari 16 kampung di 5 Kecamatan (Bl. Umpu, Umpu Semenguk, Baradatu, Way Tuba, Negeri Agung)
2. Pelatihan Konvensi Hak Anak bagi OPD dengan peserta sebanyak 30 orang yang berasal dari OPD/Instansi vertikal

3. Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA
4. Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak bagi Pengelola ILA (peserta berjumlah 40 orang berasal dari pengelola perpustakaan/pojok baca di OPD, sekolah, Kampung, dan penggiat literasi)
5. Bimbingan Teknis Standarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), peserta berjumlah 30 berasal dari Dinas Perpustakaan dan Dinas P3AP2KB
6. Bimbingan Teknis Sekolah Ramah Anak (peserta berjumlah 45 orang yang berasal dari Guru PAUD/TK)
7. Peningkatan Kapasitas Konvensi Hak Anak pada pengelola Rumah Ibadah Ramah Anak (peserta berjumlah 140 orang yang berasal dari 69 Masjid Ramah Anak, Gereja, Vihara, Pura)
8. Pertemuan Koordinasi pencegahan KTP, KTA, ABH, TPPO, dan Perkawinan Anak (peserta berjumlah 30 orang yang berasal dari LKS/LKSA)
9. Peningkatan Kapasitas Puspaga bagi FAD, Kader PATBM, dan kader Nuwa Curhat (peserta berjumlah 200 orang)
10. Dinas P3AP2KB telah melaksanakan pembentukan PUSPAGA (pusat pembelajaran keluarga). Puspaga merupakan unit layanan bagi keluarga yang tidak mengalami masalah kekerasan. Selain sebagai unit layanan.
11. PUSPAGA juga merupakan pelaksanaan mandat Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan wajib non Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 yang melingkupi Sub Urusan Kualitas Keluarga. Layanan PUSPAGA berfungsi sebagai One Stop Service/Layanan Satu Pintu Keluarga Holistik Integratif Berbasis Hak Anak. Dua jenis layanan yang wajib dimiliki PUSPAGA adalah Layanan Konseling/Konsultasi dan Layanan Informasi.

12. Dalam menjalankan programnya layanan PUSPAGA dijalankan oleh tenaga profesi Psikolog/Konselor

NO : 4
NO IKK Outcome : 2.g.2
IKK Output : Jumlah Lembaga Layanan Anak Yang Mendapat Pelatihan Tahun 2022

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PELATIHAN				
		Pelatihan KHA	Pelatihan PATBM	Pelatihan Konselor Puspaga	Pelatihan Manejeman Kasus	Pelatihan Data Simfoni
1	UPT PPA	√			√	√
2	PUSPAGA	√		√		
3	Lembaga Perlindungan Anak	√				
4	PATBM/ Perlindungan Anak terpadu Berbasis	√	√		√	
5	Nuwa Curhat	√			√	

Blambangan Umpu, 11 Januari 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Indra Kesuma, S.Sos

NIP. 196906121990031007

Adapun Permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan Nilai /Skor KLA ke Predikat selanjutnya (Utama) adalah:

1. Untuk mendapatkan Predikat Utama atau mempertahankan Predikat Nindya yang harus dipenuhi adalah score /poin Evaluasi Mandiri harus > 900, karena poin akan turun pada saat Verifikasi Administrasi oleh Dinas PP & PA Provinsi dan Kementerian PP PA. Poin turun disebabkan :
 - Data dukung yang diinput pada aplikasi tidak sesuai dengan pertanyaan
 - Dokumen pendukung yang diinput tidak lengkap
 - Pada saat Verifikasi Lapangan, data yang diinput tidak sesuai dengan kondisi di lapangan
2. Untuk mencapai Utama harus memiliki :
 - PRA terstandarisasi
 - SRA terstandarisasi
 - Puspaga terstandarisasi

- Ruang Bermain Anak terstandarisasi Ramah Anak oleh kementerian
- RBRA terstandarisasi SNI (biaya Mandiri 20 juta)

EVALUASI MANDIRI KLA 2022 KABUPATEN WAY KANAN				
KLASTER	SCORE EM	SCORE MAKSIMAL	% EM	% MAX
Kelembagaan	149,00	150,00	99,3	100
Klaster I : Hak Sipil dan Kebebasan	111,0	115,00	96,52	100
Klaster II : Lingkungan Keluarga & Pengasuhan Alternatif	164,00	170,00	96,47	100
Klaster III : Kesehatan Dasar & Kesejahteraan	142,5	150,00	95	100
Klaster IV : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Kegiatan Budaya dan Kreatifitas	87,5	110,00	79,5	100
Klaster V : Perlindungan Khusus	181	205	88,3	100
Kecamatan/Desa Layak Anak	92,10	100,00	92,1	100
TOTAL	927,1	1000	92,71	100



2. Meningkatkan Pengendalian Penduduk

Pada tahun 2023, Dinas P3AP2KB sesuai dengan IKU Perubahan yang telah diberita acarakan dan telah disetujui oleh berbagai pihak, Meningkatkan Pengendalian penduduk bukanlah sasaran yang diampu oleh Dinas P3AP2KB. Indikator Kinerjanya adalah Laju Pertumbuhan Penduduk adalah Presentase laju pertumbuhan Penduduk.

Jumlah Penduduk Kabupaten dari Periode Sensus Penduduk

Pertumbuhan penduduk sebenarnya merupakan keseimbangan dinamis antara dua kekuatan yang menambah atau yang mengurangi jumlah penduduk. Perkembangan penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir tetapi secara bersamaan pula akan dikurangi oleh jumlah kematian yang dapat terjadi pada semua golongan umur. Dalam konteks spasial moblitas penduduk juga berpengaruh terhadap perubahan dalam jumlah penduduk, dimana imigrasi akan menambah jumlah penduduk dan emigrasi akan mengurangi jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Jumlah penduduk yang besar bagi beberapa kalangan merupakan suatu hal positif karena dengan jumlah penduduk yang besar tersebut dapat dijadikan sebagai subjek pembangunan, perekonomian akan berkembang bila jumlah tenaga kerjanya banyak. Namun disisi lain beberapa kalangan justru meragukan apakah jumlah penduduk yang besar adalah sebagai asset seperti yang dijelaskan sebelumnya, akan tetapi kebalikan dari hal tersebut bahwa penduduk

merupakan beban bagi pembangunan. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang semakin lama semakin banyak pula seiring dengan perkembangan jumlah penduduk tersebut. Pandangan pesimis seperti ini di dukung oleh teori Malthus yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk menurut deret ukur sementara pertumbuhan bahan makanan menurut deret hitung. Simpulan dari pandangan pesimis ini adalah bukan kesejahteraan yang didapat tapi justru kemelaratan akan di temui bilamana jumlah penduduk tidak dikendalikan dengan baik

Pada tahun 2023 Dinas P3AP2KB Memiliki Sasaran dan indikator yang outputnya adalah Laju pertumbuhan Penduduk dengan target 0,9%. Pada tingkat realisasi sebesar 1,22% dengan uraian dibawah ini :

3.1 PENDUDUK POPULATION

Tabel 3.1.1 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk, Menurut Kecamatan di Kabupaten Way Kanan, 2023
Population, Annual Population Growth Rate, Percentage Distribution of Population, Population Density, and Population Sex Ratio, by Subdistrict in Way Kanan Regency, 2023

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (orang) Population (person)		Laju Pertumbuhan Penduduk Population Growth Rate (%)
	2022	2023	2022-2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Banjit	47.433	47.919	1,02
Baradatu	44.872	45.406	1,19
Gumung Labuhan	31.332	31.686	1,13
Kasui	33.338	33.594	0,77
Rebang Tangkas	23.892	24.100	0,87
Blambangan Umpu	37.347	38.076	1,95
Way Tuba	26.482	26.892	1,55
Negeri Agung	38.070	38.283	0,56
Umpu Semenguk	33.440	33.911	1,41
Bahuga	12.169	12.311	1,17
Buay Bahuga	21.857	22.029	0,79
Bumi Agung	29.152	29.357	0,70
Pakuan Ratu	45.437	46.012	1,27
Negara Batin	37.820	38.620	2,12
Negeri Besar	21.243	21.577	1,57
Way Kanan	483.884	489.773	1,22

Berdasarkan Data Way Kanan Dalam Angka Tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Kanan sebanyak 489.773.000 sehingga berdasarkan data diolah maka laju pertumbuhan penduduk kabupaten way kanan adalah sebesar 1,22%. Sementara target laju pertumbuhan penduduk yang ditargetkan dalam Indikator Kinerja Utama Bupati Way Kanan adalah sebesar 0,90, sehingga jika dikalkulasi maka pemenuhan kinerja target terhadap laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Way Kanan adalah 1,22% atau masuk kategori **SEDANG**. Meski realisasi indikator kinerja utama belum melampaui target kinerja yang ditetapkan sebagaimana termuat dalam perjanjian kinerja, namun kedepannya dengan peningkatan kinerja diharapkan target kinerja dapat terlampaui.

Realisasi dari indikator Laju pertumbuhan adalah sebesar 1,22 %. Target di Tahun 2023 adalah sebesar 0,9 %, Hasil pengukuran capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Presentase laju pertumbuhan Penduduk	%	0,9	0,9	1.22	73,77%

Faktor Pendorongnya :

- Selalu berupaya mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana, Generasi Berencana, Pedewasaan Usia Nikah,

Pencegahan Pernikahan Dini atau Kehamilan yang tidak dikehendaki

Faktor Penghambat :

- Pertumbuhan penduduk yang masih tinggi (banyaknya kelahiran, adanya mutasi penduduk)

bkkbn

Hasil Perhitungan Target RPJMD Way Kanan

Variabel/ Indikator	Target Nasional	SUSENAS 2019		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Prov	Kab/Kota						
LPP	0.95	1.65*	1.12	1.54*	1.48	1.43	1.38	1.34	1.30
ASFR 15-19 TH	18	36.03	34.31	33.28	28.46	27.46	26.55	25.71	24.93
TFR	2.1	2.5	2.58	2.43	2.34	2.28	2.23	2.19	2.16
CPR Modern	63.41	63	72.37	72.37	72.37	72.37	72.37	72.37	72.37
MKJP	28.39	17.68	18.14	18.75	19.65	20.44	21.15	21.79	22.37
Unmet Need	7.4	14.6	11.6	8.6	7.2	6.3	5.8	5.3	5.0
UKP	22.1	20	19	19	20	20	20	20	21

* Hasil SP Tahun 2020

BERENCANA ITU KEREN

Sumber Data : Susenas Tahun 2020

Dari Tabel diatas dapat diperoleh data Bahwa Total Fertility Rate (TFR) sebanyak 2,28 % yang artinya berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa usia subur, selain itu juga terlihat bahwa angka kelahiran remaja/Age Specific Fertility Rate (ASFR) 10-14 tahun atau 15-19 tahun adalah banyaknya kelahiran pada perempuan kelompok umur 10-14 tahun atau 15-19 tahun pada suatu periode per 1.000 perempuan pada kelompok umur yang sama pada pertengahan periode. Yakni 27,46%

4. **Sasaran : Meningkatkan Kepesertaan Keluarga Berencana**

Indikator Cakupan Peserta KB Aktiv. Dengan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Peserta Kb Aktiv}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$$

Jumlah PUS

Meningkatkan Kepesertaan Keluarga Berencana kinerja sasaran Meningkatkan Keberdayaan Perempuan adalah Indeks Pemberdayaan Gender, untuk tahun 2023 belum ada rilis dari BPS sehingga yang menjadi acuan/ rujukan capaian kinerjanya adalah Data BPS tahun 2022. Yaitu sebesar indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

5.

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Kepesertaan KB	%	82,9	82,9	71,97	86,81

Data SIGA Dinas P3APPKB Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kepesertaan Keluarga Berencana pada Tahun 2023 adalah sebesar 71,97%. Ada penurunan dari capaian tahun 2022 yakni sebesar 82,9 % hal ini disebabkan oleh. Jumlah Kepesertaan KB mengalami penurunan.

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun, dan secara operasional termasuk pula pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan telah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih haid. Berdasarkan maksud dan tujuan kontrasepsi, maka yang membutuhkan kontrasepsi adalah pasangan usia subur (PUS) yang aktif melakukan hubungan seks dan kedua-duanya memiliki

kesuburan normal namun tidakmenghendaki kehamilan.

Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi disebut peserta/akseptor KB. Peserta KB adalah PUS yang sedang menggunakan salah satu metode kontrasepsi. Sedangkan Peserta KB aktif adalah peserta KB yang sedang menggunakan salah satu metode kontrasepsi secara terus-menerus tanpa diselingi kehamilan.

Target peserta KB Aktif Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Kabupaten Way Kanan pada tahun 2023 adalah sebesar 82,9. Untuk mencapai target kinerja tersebut Dinas P3AP2KB melalui Bidang KB dan Ks telah melaksanakan kegiatan diantaranya sebagai berikut :

1. Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) pada 22 fasilitas Kesehatan (Faskes) yang sudah terdaftar. Adapun faskes yang telah teregistrasi dalam aplikasi *NEW SIGA* sebagai berikut :

Tabel. 5.1 DAFTAR NAMA FASKES SE-KAB. WAY KANAN

NO	NAMA NAMA FASKES
1	FASKES BLAMBANGAN UMPU
2	FASKES NEGERI BARU
3	FASKES BUMI RATU
4	FASKES BARADATU
5	FASKES GUNUNG LABUHAN
6	FASKES NEGERI AGUNG
7	FASKES KASUI
8	FASKES BANJIT
9	FASKES REBANG TANGKAS
10	FASKES WAY TUBA
11	FASKES PISANG BARU
12	FASKES BUMI AGUNG
13	FASKES SUKABUMI
14	FASKES MESIR ILIR
15	FASKES PAKUAN RATU
16	FASKES SERUPA INDAH

17	FASKES PURWA AGUNG
18	FASKES NEGERI BESAR
19	FASKES ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM
20	FASKES KAMINO
21	FASKES TJ.REJO
22	FASKES GISTING JAYA

Sumber: Data New Siga Tahun 2023

2. Pelayanan KB Keliling yang dilaksanakan di sebanyak 30 kali gerak dengan data sebagai berikut :

**Tabel 5.2 Data Pelayanan KB Bergerak Kabupaten Way
Kanann Tahun 2023**

NO	TARGET	LOKASI	REALISASI	JUMLAH PELAYANAN (AKSEPTOR KB)
1	30 GERAK 1 TAHUN	Rambang Jaya Umpu Semenguk	1. Kampung Rambang Jaya	Implant : 14 Akseptor
				Suntik : 10 Akseptor
				IUD : 2 Akseptor
		Baradatu	2. RS. H. Kamino Baradatu	Implant : 26
		Tanjung Sari Blambangan Umpu	3. Kampung Tanjung Sari	Implant : 12 Akseptor
				Suntik : 2 Akseptor
Bengkulu	4. Kampung	Implant : 15		
		Gunung Labuhan	Bengkulu	Akseptor
		Bandar Dalam Negeri Agung	5. Kampung Bandar Dalam	Implant : 13 Akseptor
		Panca Negeri Umpu Semenguk	6. Kampung Panca Negeri	Implant : 13 Akseptor
		Buay Bahuga	7. Faskes Sukabumi	Implant : 15 Akseptor

	Tanjung Serupa Pakuan Ratu	8. Kampung Tanjung Serupa	Implant : 20 Akseptor
	Bhakti Negara Baradatu	9. Kampung Bhakti Negara	Implant : 14 Akseptor

Sumber : Data Bidang KB dan KS Dinas P3AP2KB Tahun 2023

3. Melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pada 15 Kecamatan yang disampaikan melalui UPT, PKB dan Kader PPKBD yang ada dengan menggunakan Media Cetak (Leaflet) dengan mengusung tema “ Stunting”



- Sumber Data : Sekretaria Dinas P3AP2KB Kab. Way Kanan tahun 2023
4. Kegiatan Mini Lokakarya Tingkat Kecamatan yang melibatkan seluruh stakeholder tingkat kecamatan se-Kabupaten Way Kanan.

Gambar 5.2 Mini Lokakarya Tingkat Kecamatan Tahun 2023



Sumber Data : Sekretariat Dinas P3AP2KB Kab. Way Kanan Tahun 2023

Dari kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan Kepesertaan Keluarga Berencana diperoleh hasil bahwa UN MEET NEED (Keinginan Ber-KB Tidak Terpenuhi)

- PUS 76.660
- Ingin anak ditunda 4.035
- Tidak ingin anak lagi 4.449
- Un met need 11.06 %

Terdistribusinya Alat Kontrasepsi Ke Faskes

- IUD 185
- PIL : 53.900
- Kondom 140
- Suntik : 32.695
- Implant : 2.496

Data tersebut tersebar dimasing-masing kecamatan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.5 berikut ini:

PENCAPAIAN PESERTA KB BARU PER - KECAMATAN KABUPATEN WAY KANAN
S/D BULAN DESEMBER 2023

NO	KECAMATAN	IUD		MOW		MOP		KDM		IMP		STK		PIL		TOTAL PB	
		PPM	R	PPM	R	PPM	R	PPM	R	PPM	R	PPM	R	PPM	R	PPM	R
			%		%		%		%		%		%		%		%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Biambangan Umpu	10	16	52	33	-	-	136	73	160	183	341	140	196	114	895	559
			160,00		63,46		0,00		53,68		114,38		41,06		58,16		62,46
2	Kasui	6	-	-	-	-	-	128	10	160	70	338	57	183	61	815	198
			0,00		0,00		0,00		7,81		43,75		16,86		33,33		24,29
3	Banjit	6	2	-	-	2	-	128	26	160	80	338	156	183	137	817	401
			33,33		0,00		0,00		20,31		50,00		46,15		74,86		49,08
4	Baradatu	6	56	60	106	-	-	128	156	160	297	338	291	183	153	875	1.059
			933,33		176,67		0,00		121,88		185,63		86,09		83,61		121,03
5	Bahuga	6	-	-	-	-	-	128	-	160	4	338	44	183	13	467	61
			0,00		0,00		0,00		0,00		2,50		13,02		7,10		13,06
6	Pakuan Ratu	6	-	-	-	-	-	128	54	160	66	338	108	183	35	815	263
			0,00		0,00		0,00		42,19		41,25		31,95		19,13		32,27
7	Negeri Agung	6	-	-	-	-	-	128	22	160	49	338	198	183	156	815	425
			0,00		0,00		0,00		17,19		30,63		58,58		85,25		52,15
8	Way Tuba	6	8	-	1	-	-	128	2	160	44	338	238	183	13	815	306
			133,33		0,00		0,00		1,56		27,50		70,41		7,10		37,55
9	Rebang Tangkas	6	-	-	-	1	-	128	51	160	79	338	73	183	54	816	257
			0,00		0,00		0,00		39,84		49,38		21,60		29,51		31,50
10	Gunung Labuhan	6	-	-	-	-	-	128	27	160	62	338	77	183	43	815	209
			0,00		0,00		0,00		21,09		38,75		22,78		23,50		25,64
11	Negara Batin	6	-	-	-	-	-	128	-	160	66	338	18	183	84	815	168
			0,00		0,00		0,00		0,00		41,25		5,33		45,90		20,61
12	Negeri Besar	6	-	-	-	-	-	128	9	160	20	338	91	183	124	815	244
			0,00		0,00		0,00		7,03		12,50		26,92		67,78		29,94
13	Buay Bahuga	6	4	-	-	-	-	128	11	160	42	338	150	183	109	815	316
			66,67		0,00		0,00		8,59		26,25		44,38		59,56		38,77
14	Bumi Agung	6	2	-	-	-	-	128	89	160	88	338	174	183	260	815	613
			33,33		0,00		0,00		69,53		55,00		51,48		142,08		75,21
15	Umpu Semenguk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		88	17	112	140	3	-	1.800	630	2.240	1.160	4.736	1.816	2.676	1.356	11.653	5.008
			19,32		125,00		0,00		29,44		51,34		38,33		62,86		43,36

KABID PENGENDALIAN PENDUDUK,
PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN

HAIRUSE

NIP.19791011 200701 1 016

KASI PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN INFORMASI KELUARGA

PUSRIASARI, S.Ked., MM

NIP. 19870919 201101 2 001

MENGETAHUI
KEPALA DINAS P3AP2KB
KABUPATEN WAY KANAN

INDI OKTOVIANDI, SKM, MM

NIP. 19801010 202312 1 005

**PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF & UNMEETNEED PER - KECAMATAN KABUPATEN WAY KANAN
BULAN DESEMBER TAHUN 2023**

NO	KECAMATAN	MIX KONTRASEPSI														TOTAL PA		PUS	PA/PUS	UNMEET NEED
		IUD		MOW		MOP		KDM		IMP		STK		PIL		PPM	R			
		PPM	R %	PPM	R %	PPM	R %	PPM	R %	PPM	R %	PPM	R %	PPM	R %					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	17		
1	Blambangan Umpu	382	148	345	174	17	3	269	181	1.036	1.055	4.921	5.698	986	827	7.956	8.086	11.406	70,89	8,78
			38,74		50,43		17,65		67,29		101,83		115,79		83,87		101,63			
2	Kasui	50	19	36	21	8	2	94	145	432	384	1.725	1.940	653	765	2.998	3.276	4.794	68,34	14,33
			38,00		58,33		25,00		154,26		88,89		112,46		117,15		109,27			
3	Banjit	59	34	126	56	20	2	53	72	981	765	2.923	3.404	1.037	1.005	5.199	5.338	7.122	74,95	6,37
			57,63		44,44		10,00		135,85		77,98		116,46		96,91		102,67			
4	Baradatu	200	74	231	114	24	5	150	91	1.360	1.105	2.226	2.658	1.184	956	5.375	5.003	6.935	72,14	11,61
			37,00		49,35		20,83		60,67		81,25		119,41		80,74		93,08			
5	Bahuga	29	7	18	4	4	1	28	51	346	273	862	1.000	226	357	1.513	1.693	2.075	81,59	17,45
			24,14		22,22		25,00		182,14		78,90		116,01		157,96		111,90			
6	Pakuan Ratu	141	49	63	23	-	-	100	88	1.414	1.144	2.532	3.039	666	543	4.916	4.891	7.209	67,85	15,15
			34,75		44,44		#DIV/0!		88,00		80,91		78,10		81,53		99,49			
7	Negeri Agung	76	28	187	69	28	3	85	105	813	623	2.440	2.648	667	639	4.296	4.115	6.045	68,07	3,28
			36,84		36,90		10,71		123,53		76,63		108,52		95,80		95,79			
8	Way Tuba	150	52	55	31	12	3	47	99	397	542	1.913	2.413	461	465	3.035	3.605	4.385	82,21	13,39
			34,67		56,36		25,00		210,64		136,52		126,14		100,87		118,78			
9	Rebang Tangkas	9	3	33	17	-	-	72	81	437	416	1.421	1.542	711	709	2.683	2.768	3.681	75,20	8,26
			33,33		51,52		#DIV/0!		112,50		95,19		108,52		99,72		103,17			
10	Gunung Labuhan	35	6	84	40	4	1	47	59	357	342	1.833	1.926	554	903	2.914	3.277	4.652	70,44	10,47
			17,14		47,62		25,00		125,53		95,80		105,07		163,00		112,46			

NO	KECAMATAN	MIX KONTRASEPSI														TOTAL PA		PUS	PA/PUS	UNMEET NEED
		IUD		MOW		MOP		KDM		IMP		STK		PIL		PPM	R %			
		PPM	R %	PPM	R %	PPM	R %	PPM	R %	PPM	R %	PPM	R %	PPM	R %			17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	17
11	Negara Batin	211	68	21	23	8	-	75	33	835	651	2.097	2.391	393	464	3.640	3.630	5.561	65,28	12,17
			32,23		109,52		0,00		44,00		77,96		114,02		118,07		99,73			
12	Negeri Besar	26	6	36	16	8	2	72	110	416	390	1.113	1.226	220	432	1.891	2.182	3.113	70,09	12,21
			23,08		44,44		25,00		152,78		93,75		76,22		196,36		115,39			
13	Buay Bahuga	126	39	69	24	20	5	69	41	859	599	1.362	1.573	701	643	3.206	2.924	3.768	77,60	10,48
			30,95		34,78		25,00		59,42		69,73		115,49		91,73		91,20			
14	Bumi Agung	120	35	69	20	16	2	157	48	1.034	833	1.754	1.825	612	639	3.762	3.402	4.547	74,82	12,14
			29,17		28,99		12,50		30,57		80,56		104,05		104,41		90,43			
		1.614	568	1.373	637	169	29	1.318	1.204	10.717	9.122	29.122	33.283	9.071	9.347	53.384	54.190	75.293	71,97	11,15
			35,19		46,39		17,16		91,35		85,12		114,29		103,04		101,51			

KABID PENGENDALIAN PENDUDUK,
PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN


HARI SE


NIP.19791011 200701 1 016

PENATA KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA MUDA


PUSPITASARI, S. Kep., M.M

NIP.19870919 2011 01 2 001

MENGETAHUI
KEPALA DINAS P3AP2KB
KABUPATEN WAY KANAN


ANDI OKTOVIANDI, SKM., MM
NIP.19801010 200312 1 005

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa Peserta KB baru sebanyak 646 Akseptor dan peserta KB Aktif Sebanyak 53.384 dan pasangan Usia Subur sebanyak 75293 Asektor sehingga diperoleh hasil bahwa cakupan peserta KB aktif sebesar 68,67% nilai ini di peroleh dari Peserta KB aktif (52.641) dibagi jumlah Pasangan Usia subur (75293) di kali 100 Persen : 71,97 persen dengan capaian kerja 86% .

Peserta KB Aktif per WUS usia 15-49 Tahun merupakan jumlah anak rata rata yang dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung atau rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya.

Peserta KB Aktif per WUS usia 15-49 Tahun pada tahun 2022 capaian 2,53. Untuk tahun 2023 capaian 2,29 meningkat dari tahun 2022. Indikator ini penting dan strategis untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu negara ataupun seluruh negara dalam mengendalikan jumlah penduduknya melalui program Keluarga Berencana. Dalam hal ini, TFR sebesar 2,1 merupakan angka standar capaian ideal bagi seluruh negara (penduduk tumbuh seimbang). Dengan TFR 2,1 maka 2 orang anak yang dilahirkan hanya akan menggantikan kedua orang tuanya. Adapun capaian TFR (TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Kabupaten/Kota se Kabupaten Way Kanan Tahun 2023, dapat dilihat pada table dibawah ini:

hal ini disebabkan oleh beberapa hal diataranya adalah

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk ber-KB
2. Tidak Maksimalnya pelaksanaan kegiatan
3. Minimnya Duukungan Kegiatan oleh stake holder
4. Minimnya tenaga Penyuluh Lapangan

Dari adanya factor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada cakupan peserta KB aktif tersebut maka, padatahun 2023 Dinas P3AP2KB Kab upaten Way Kanan Melalau Bidang KB dan KS akan melakukan kegiatan diantaranya :

1. Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi dengan Optimalisasi Kegiatan Program Bangga Kencana melalui pemanfaatan Media elektornik (Radio dan TV) diharapkan Melalui KIE ini dapat lebih mengoptimalkan pengetahuan masyarakat tentang Ber-KB hingga ke daerah yang sulit terjangkau

2. Perencanaan Kegiatan lebih maksimal lagi dengan meletakkan kegiatan TKBK (Tim KB keliling pada awal Tahun yakni dimulai pada bulan Februari)
3. Advokasi Kegiatan Program Bangga Kencana Hingga Tingkat Kampung
4. Menambah Tenaga Penyuluh melalui Kader Tingkat Kampung dengan Memberikan Dukungan Insentif Kepada Kader KB

Adapun beberapa Faktor Pendukung, antara lain:

1. Perluasan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan KB:

- **Perluasan Akses Layanan KB:**
 - Peningkatan jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan KB, seperti puskesmas, klinik KB, dan posyandu.
 - Peningkatan jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dalam memberikan layanan KB.
 - Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk layanan KB.

- *Peningkatan Kualitas Layanan KB:*
 - Peningkatan mutu pelayanan KB.
 - Peningkatan sikap dan perilaku tenaga kesehatan dalam memberikan layanan KB.
 - Peningkatan konseling dan edukasi kepada pengguna layanan KB.

2. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi tentang Program Keluarga Berkualitas:

- **Peningkatan Kesadaran:**
 - Kampanye dan sosialisasi program Keluarga Berkualitas melalui berbagai media, seperti media massa, media sosial, dan kegiatan penyuluhan.
 - Pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuka adat dalam promosi program Keluarga Berkualitas.
 - Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk promosi program Keluarga Berkualitas.

- ***Peningkatan Edukasi:***
 - Penyediaan informasi yang lengkap dan jelas tentang program Keluarga Berkualitas.
 - Pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan seksual bagi remaja dan pemuda.
 - Pembinaan ketahanan keluarga.

3. Pergeseran Norma Sosial dan Budaya:

- **Perubahan norma sosial dan budaya yang tidak mendukung program Keluarga Berkualitas:**

Edukasi dan komunikasi perubahan perilaku (KPP) untuk mengubah norma dan budaya yang tidak mendukung program Keluarga Berkualitas.
- ***Pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuka adat dalam advokasi dan kebijakan untuk mendukung program Keluarga Berkualitas:***

Seminar, lokakarya, dan pertemuan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuka adat untuk membahas tentang pentingnya program Keluarga Berkualitas.
- ***Pembuatan peraturan daerah yang mendukung program Keluarga Berkualitas:***

Mewajibkan pasangan usia subur (PUS) untuk mengikuti program KB.

4. Faktor Lain:

- **Peningkatan tingkat pendidikan dan ekonomi:**

Masyarakat dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki lebih sedikit anak.
- ***Urbanisasi:***

Biaya hidup di kota yang lebih tinggi dan akses yang lebih mudah

terhadap layanan Keluarga Berkualitas.

- ***Peningkatan usia pernikahan:***

Perempuan memiliki lebih sedikit waktu untuk hamil dan melahirkan selama masa reproduksinya.

Faktor Penghambat Penurunan TFR di Kabupaten Way Kanan:

1. Faktor Sosial Budaya:

- **Norma dan budaya patriarki:**

Budaya patriarki yang masih kuat di Kabupaten Way Kanan, di mana laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama dan perempuan bertanggung jawab atas urusan rumah tangga dan anak-anak, dapat mendorong perempuan untuk memiliki lebih banyak anak.

- **Ketersediaan tenaga kerja anak:**

Di beberapa daerah pedesaan di Kabupaten Way Kanan, anak-anak masih dianggap sebagai tenaga kerja yang membantu orang tua mereka dalam pekerjaan pertanian atau perkebunan.

- **Nilai dan kepercayaan tradisional:**

Nilai dan kepercayaan tradisional yang menganggap bahwa banyak anak adalah berkah dan simbol kesuburan dapat menghambat upaya penurunan TFR.

2. Faktor Ekonomi:

- **Kemiskinan:**

Kemiskinan dapat mendorong perempuan untuk memiliki lebih banyak anak sebagai jaminan sosial di masa depan.

- **Biaya hidup:**

Biaya hidup yang tinggi di beberapa daerah di Kabupaten Way Kanan, terutama di kota-kota besar, dapat menjadi hambatan bagi

keluarga untuk memiliki lebih banyak anak.

- **Akses terhadap pendidikan dan pekerjaan:**

Terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan dapat mendorong mereka untuk menikah dan memiliki anak di usia muda

3. Faktor Akses dan Kualitas Layanan KB:

- **Akses terhadap layanan KB:**

Di beberapa daerah terpencil di Kabupaten Way Kanan, akses terhadap layanan KB masih terbatas. **Kualitas layanan KB:**

Kualitas layanan KB yang kurang memadai, seperti kurangnya informasi dan pilihan metode KB, dapat membuat perempuan enggan untuk menggunakan KB.

- **Kesadaran dan edukasi tentang program KB:**

Kurangnya informasi dan edukasi tentang program KB, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, dapat menjadi hambatan bagi penurunan TFR.

4. Faktor Lain:

- **Ketersediaan dan akses terhadap informasi:**

- Ketersediaan dan akses terhadap informasi yang akurat tentang kesehatan reproduksi dan seksual masih terbatas di beberapa daerah di Kabupaten Way Kanan.

- ***Keterlibatan laki-laki dalam program KB:***

- Kurangnya keterlibatan laki-laki dalam program KB dapat menjadi hambatan bagi penurunan TFR Indikatornya adalah Cakupan Pembinaan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Realisasinya adalah 22,93% dari target 10% dimana pemberdayaan keluarga sejahtera ini terdiri dari :

1. Pembinaan Kelompok Tribina Melalui ketahanan Keluarga

Tabel 6.1**Data kelompok Kegiatan Dinas P3AP2KB Kab. Way Kanan Tahun 2023**

No	Kecamatan	BKB	BKR	BKL	PIK-R	UPPKA
1	Blambangan Umpu	5	1	2	6	2
2	Kasui	2	2	2	2	2
3	Banjit	3	2	2	2	2
4	Baradatu	3	2	3	5	2
5	Bahuga	3	2	2	0	2
6	Pakuan Ratu	3	1	2	2	2
7	Negeri Agung	3	2	4	3	2
8	Way Tuba	5	3	3	2	2
9	Rebang Tangkas	3	3	3	2	2
10	Gunung Labuhan	2	2	1	3	1
11	Negara Batin	3	1	2	1	1
12	Negeri Besar	2	2	3	3	1
13	Buay Bahuga	2	2	2	2	2
14	Bumi Agung	5	1	6	3	2
	Total	56	29	50	43	27

Sumber Data : Bidang KB dan KS Dinas P3AP2Kb Kab. Way Kanan Tahun 2023

Data tersebut merupakan Jumlah Kelompok kegiatan yang ada di masing-masing Kecamatan se-Kab. Way Kanan. Untuk kegoatan tahun 2023 telah dilaksankannya Pembinaan terhadap Kelompok Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6. 2 tabel Pembinaan Kelompok Kegiatan Tahun 2023

NO	NAMA POKTAN	JUMLAH	JUMLAH YANG TELAH DIBINA	PERSENTASE (%)
1	Bina Keluarga Balita	56	5	8,93
2	Bina Keluarga Remaja	29	5	17,24
3	PIK Remaja	43	34	79,07
4	Bina Keluarga Lansia	50	0	0
5	UPPKA	27	3	11,11

JUMLAH	205	47	22,93
---------------	------------	-----------	--------------

Sumber Data : Bidang Kb dan KS Dinas P3AP2KB Kab. Way Kanan Tahun 2023 Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam meningkatkan Pemberdayaan keluarga sejahtera yang dilakukan dilakukan Dinas P3AP2KB Kab. Way Kanan adalah Pembinaan Terhadap Kelompok Kegiatan yang ada di masyarakat dengan kegiatan : Pengelolaan Dapur Sehat Atasi stunting (Dashat), Pembekalan Remaja siap Nikah, Pemberian edukasi Kepada Kelompok PIK -R di sekolah dan juga UPPKA melalui pengelolaan Halaman Pekarangan.

Dari data yang diperoleh maka adanya peningkatan cakupan Pembinaan Kelompok Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga sebesar 22,93%. Diperoleh dari data jumlah kelompok yang telah dibina (47 kelompok) dibagi jumlah seluruh kelompok yang ada (205). Jika melihat target tahun 2023 yakni sebesar 10 % maka capaian kinerja sebesar 229,3 %. Dari kelima kelompok kegiatan (BKL,BKR,PIK- R,UPPKS,dan BKB) yang tidak ada capaiannya yang tidak mencapai target adalah kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) hal ini dikarenakan pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Way Kanan Melalui Dinas P3AP2KB fokus pada Penurunan Stunting, dimana Dinas P3AP2KB sebagai Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Berdasarkan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B.54/IV.II- WK/HK/2023 Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023-2024.

2. Penyelenggaraan HARGANAS (hari keluarga nasional)

HARGANAS dilaksanakan setiap tanggal 7 Juni, HARGANAS merupakan hari yang dibentuk sebagai peringatan Hari Keluarga Nasional kepada masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga. Keluarga dianggap memiliki peran besar sebagai upaya memperkuat ketahanan nasional dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pada tahun 2023 Dinas P3AP2KB Melaksanakan Kegiatan HARGANAS dengan mengusung Tema “ AYO CEGAH STUNTING AGAR KELUARGA BEBAS STUNTING”.

Secara umum tema ini untuk mensinergikan gerak dan langkah keluarga Indonesia dalam mencegah stunting sedangkan secara khusus bertujuan untuk meningkatkan peran stakeholder tokoh masyarakat dan keluarga dalam pembangunan keluarga. Selain itu meningkatkan kinerja pengelola program Bangga Kencana

dalam meningkatkan hasil dan capaian Bangga Kencana dan meningkatkan kepedulian keluarga dalam pencegahan stunting. Kegiatan HRAGNAS melibatkan TPPK Kabupaten Way Kanan. Adapun rangkaian kegiatan diantaranya adalah :

- Pelayanan seribu Akseptor di 23 Faskes yang ada di Kabupaten Way Kanan

Tabel Faskes Penerima Akseptor Kab. Way Kanan

NO	NAMA NAMA FASKES
1	FASKES BLAMBANGAN UMPU
2	FASKES NEGERI BARU
3	FASKES BUMI RATU
4	FASKES BARADATU
5	FASKES GUNUNG LABUHAN
6	FASKES NEGERI AGUNG
7	FASKES KASUI
8	FASKES BANJIT
9	FASKES REBANG TANGKAS
10	FASKES WAY TUBA
11	FASKES PISANG BARU
12	FASKES BUMI AGUNG
13	FASKES SUKABUMI
14	FASKES MESIR ILIR
15	FASKES PAKUAN RATU
16	FASKES SERUPA INDAH
17	FASKES PURWA AGUNG
18	FASKES NEGERI BESAR
19	FASKES ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM
20	FASKES KAMINO
21	FASKES TJ.REJO
22	FASKES GISTING JAYA

Sumber Data : New Siga Tahun 2023

5.Sasaran : Meningkatkan Keberdayaan Perempuan

Indikator kinerja sasaran Meningkatkan Keberdayaan Perempuan adalah Indeks Pemberdayaan Gender, untuk tahun 2023 belum ada rilis dari BPS sehingga yang menjadi acuan/ rujukan capaian kinerjanya adalah Data BPS tahun 2022. Yaitu sebesar indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai SAKIP DINAS P3AP2KB	%	61,82	66,61	60,36	91,02

Sumber BPS tahun 2022.

Dari tabel diatas dapat terlihat adanya penurunan angka capaian IDG pada tahun 2022 kabupaten way kanan sebesar 60,36% mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2021 yakni sebesar 61.82 %. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan pada salah satu komponen Indeks Pemberdayaan Gender yakni pada Sumbangan Pendapatan Kepala Keluarga Perempuan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Dalam persamaan peranan ini diharapkan perempuan memiliki peran yang proporsional dalam hal kehidupan ekonomi, politik, maupun dalam pengambilan keputusan. Unsur-unsur persamaan peranan tersebut merupakan komponen/indikator yang tercakup dalam Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Tabel Komponen Penghitungan IDG

KOMPONEN	INDIKATOR
Keterwakilan di Parlemen	Proporsi keterwakilan di parlemen untuk laki-laki dan perempuan

Pengambilan keputusan	proporsi manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi untuk laki-laki dan perempuan.
Sumbangan Pendapatan	Upah buruh non pertanian untuk laki-laki dan perempuan.

a. Keterlibatan Perempuan Dalam Parlemen (DPRD)

keterwakilan politik perempuan pertamakali tertuang dalam UU Pemilu nomor 12 tahun 2003 di pasal 65 (1) yang menyatakan bahwa setiap Partai Politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Di Kabupaten Way Kanan Pada Pemilu Tahun 2019 tercatat adalah sebagai berikut :

No	Nama	Partai	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Abu Rizal Setiawan	PKB	√	
2	Sairul Sidiq	PKB	√	
3	Yuliyus Arifien Jaya	PKB	√	
4	H. Romli	PKB	√	
5	Ky. Mustajab	Gerindra	√	
6	A. Haris Nasution	Gerindra	√	
7	Azis Muslim	Gerindra	√	
8	Adinata	Gerindra	√	
9	Masda Yulita	PDI-P		√
10	Komang Trawan	PDI-P	√	
11	Hi. Hamdani	PDI-P	√	
12	Beta Juana	PDI-P	√	
13	Dwi Subagio	Golkar	√	

14	Bambang Irawan	Golkar	√	
15	Suriah	Golkar		√
16	I Nyoman Karinu	Golkar	√	
17	Nagamas	Nasdem	√	
18	Jawiko	Nasdem	√	
19	Tari Innes Safitri	Nasdem		√
20	Yusse Sogoran	Nasdem	√	
21	Tukiman Ngalimun	Nasdem	√	
22	Hamim Akbar	PKS	√	
23	H. Danu Wildan Gotama	PKS	√	
24	Wilma Fadli	PAN	√	
25	Lukman	PAN	√	
26	Ari Saputra	PAN	√	
27	Rozali	PAN	√	
28	Nengah Putre	HANURA	√	
29	Doni Ahmat Ira	HANURA	√	
30	Rial Kalbadi	DEMOKRAT	√	
31	Fersa Amiranata	DEMOKRAT	√	
32	Hi. Hairullah	DEMOKRAT	√	
33	Rena Yani	DEMOKRAT		√
34	Agus Irawan	DEMOKRAT	√	
35	Badrison	DEMOKRAT	√	
36	Hi. Arsad	DEMOKRAT	√	
37	Nikman Karim	DEMOKRAT	√	
38	Muharis	DEMOKRAT	√	
39	Mulyadi	DEMOKRAT	√	
40	Hotman	DEMOKRAT	√	

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kab. Way Kanan Tahun 2023

Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa persentase keterlibatan perempuan di Parlemen hanya sebesar 10 persen. Angka persentase ini masih jauh dibawah batas minimal 30 persen

keterwakilan perempuan dalam parlemen. Hal ini menunjukkan masih rendahnya partisipasi perempuan dalam politik sehingga perlu adanya perhatian khusus bagi pemerintah mengenai peran perempuan dalam politik ini.

Dinas P3AP2KB melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender pada tahun 2023 telah melaksanakan beberapa Kegiatan dalam rangka mendorong Partisipasi perempuan dalam politik diantaranya adalah : Pembinaan pada organisasi wanita dan politik (6 Organisasi Wanita)

Tabel Organisasi Wanita Tahun 2023

No	Nama Organisasi
1.	Gabungan Organisasi Wanita
2	Dharma Wanita Persatuan
3	Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia
4	Lembaga Perlindungan Anak
5	Persit
6	Bhayangkari

Sumber Data : Bidang PP dan PUG Dinas P3AP2KB
Tahun 2023

Melalui Kegiatan Organisasi Wanita diharapkan Partisipasi Perempuan dalam Politik Semakin Membaik Karen didalam kegiatan organisasi wanita tersebut terdapat Advokasi dan Edukasi tentang peran perempuan terhadap politik yang dilaksanakan oleh KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) yang dilaksanakan di 15 Kecamatan se-Kabupaten Way Kanan.

b. Pengambilan keputusan

Indikatornya adalah proporsi manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi untuk laki-laki dan perempuan. Jika Dilihat dari jenjang Karir pada Birokrasi Pemerintah Kabupaten Way Kanan, Maka dapat terlihat pada bagan dibawah ini:

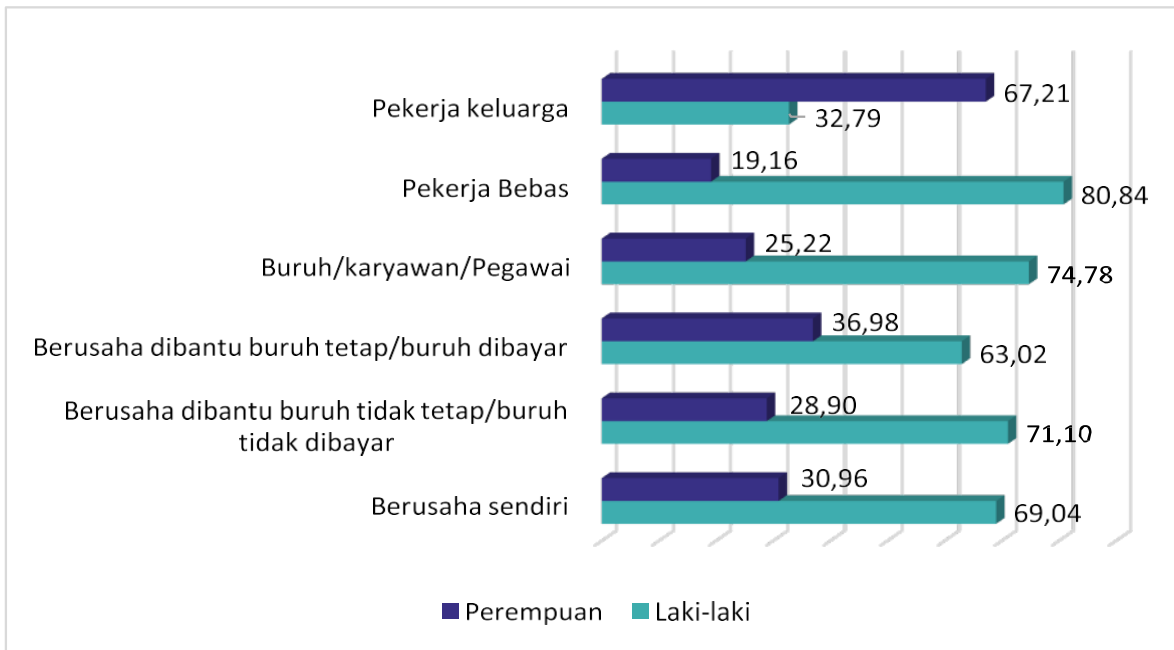
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Pemerintah Daerah
Kabupaten Way Kanan, Desember 2022
/Number of Civil Servants by Occupation and Sex, December 2021**

Pangkat/Golongan/Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
<i>Hierarchy</i>	<i>Male</i>	<i>Female</i>	<i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Fungsional Tertentu/ <i>Specific</i>	1163		3022
<i>Functional</i>		85	
		9	
Fungsional Umum/Staf/ <i>General</i>	737		1445
<i>Functional</i>		08	
Struktural/ <i>Structural</i>	569	25	794
Eselon V/ <i>5th Echelon</i>	-		-
Eselon IV/ <i>4th Echelon</i>	399	98	597
Eselon III/ <i>3rd Echelon</i>	139		164
		5	
Eselon II/ <i>2nd Echelon</i>	33		35
Eselon I/ <i>1st Echelon</i>	-		-
Jumlah/ Total	3.040	995	4035

Sumber : BPS Kab. Way Kanan Tahun 2022

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa dari jenjang karir birokrasi keterwakilan perempuan hanya sebesar 24,69 persen sementara laki-laki sebesar 75,34% artinya keterwakilan perempuan dalam birokrasi pun masih kurang dari 30 persen.

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Way Kanan, 2021 (%)



Sumber PBS Tahun 2022

Dari Grafik diatas terlihat bahwa perempuan mendominasi dalam pekerja keluarga yakni sebesar 67,21 Persen, sedangkan dlam sector Buruh/Karyawan/Pegawai Hanya 25, 22 Persen, artinya bahwa masih sangat rendah peran serta perempuan dalam pengambilan keputusan .

c. Sumbangan Pendapatan Perempuan

Dalam ranah gender, jenis kelamin masih sering digunakan sebagai persyaratan dalam pembagian kerja. Paradigma laki-laki memiliki kewajiban untuk mencari nafkah dan bekerja, sedangkan perempuan memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga masih jamak di masyarakat. Secara total, pada periode Agustus 2022 persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja yaitu sebesar 72,27 persen. Secara gender, tahun 2022 TPAK mencatat hanya sekitar 57,47 persen perempuan yang siap dalam dunia kerja. Sementara laki-laki sudah mencapai sekitar 90,69 persen. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa dunia kerja di Kabupaten Way Kanan masih di dominasi laki-laki.(Sumber BPS Tahun 2022) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meliputi semua penduduk yang masuk dalam angkatan kerja namun

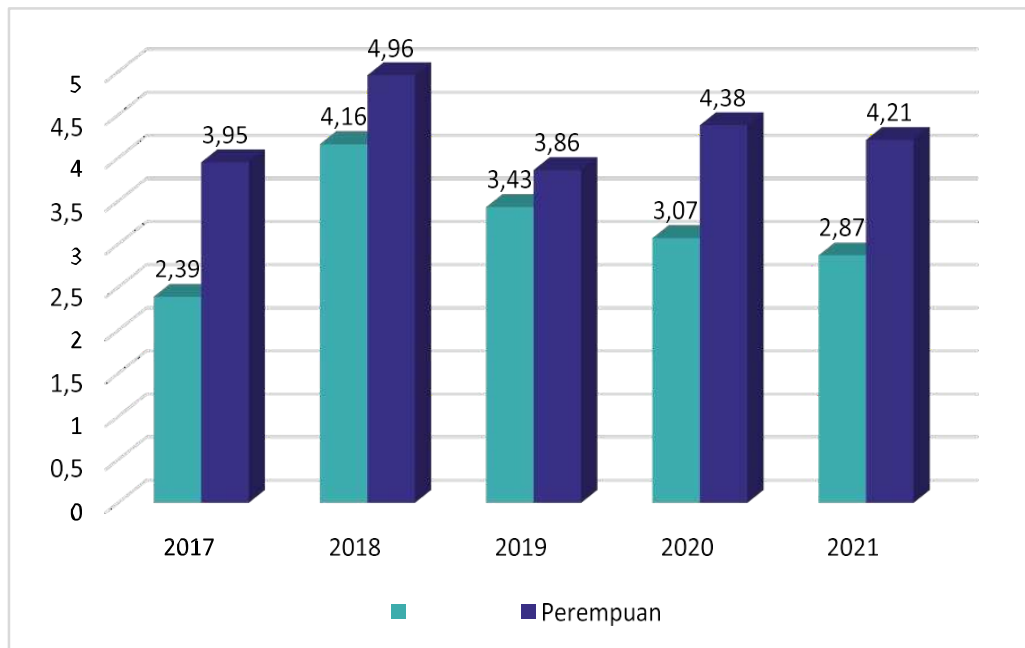
tidak punya pekerjaan, mempersiapkan usaha, ataupun mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Berkebalikan dengan partisipasi angkatan kerja, TPT perempuan cenderung lebih tinggi dibanding laki-laki. Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup jauh perbedaannya, dimana laki-laki jauh lebih banyak dibanding perempuan, persentase pengangguran justru lebih dominan perempuan. Fenomena ini menunjukkan kesempatan dan peluang kerja bagi perempuan masih belum terbuka lebar pembagian kerja. Paradigma laki-laki memiliki kewajiban untuk mencari nafkah dan bekerja, sedangkan perempuan memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga masih jamak di masyarakat. Secara total, pada periode Agustus 2021, persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja yaitu sebesar 72,27 persen. Secara gender, tahun 2021, TPAK mencatat hanya sekitar 57,47 persen perempuan yang siap dalam dunia kerja. Sementara laki-laki sudah mencapai sekitar 90,69 persen. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa dunia kerja di Kabupaten Way Kanan masih di dominasi laki-laki.

Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meliputi semua penduduk yang masuk dalam angkatan kerja namun tidak punya pekerjaan, mempersiapkan usaha, ataupun mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Berkebalikan dengan partisipasi angkatan kerja, TPT perempuan cenderung lebih tinggi dibanding laki-laki. Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup jauh perbedaannya, dimana laki-laki jauh lebih banyak dibanding perempuan, persentase pengangguran justru lebih dominan perempuan. Fenomena ini menunjukkan

kesempatan dan peluang kerja bagi perempuan masih belum terbuka lebar.

Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017-2021 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik

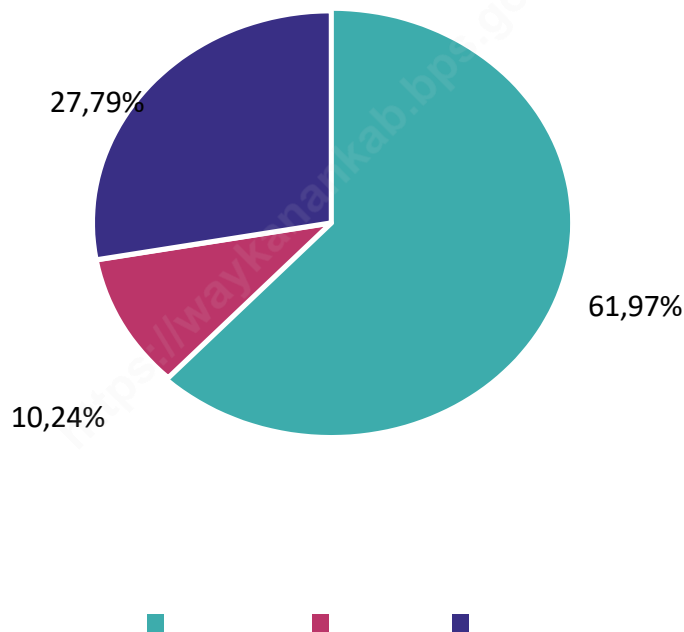
Kondisi Pekerjaan

Mereka yang terserap di berbagai lapangan pekerjaan pada periode Agustus secara total masih dominan pada sektor pertanian yaitu 63,93 persen. Berdasarkan gambar 9 dapat dilihat bahwa proporsi penduduk laki-laki bekerja di pertanian sebesar 64,68 persen. Artinya, pekerja pada sektor pertanian di dominasi oleh laki-laki, dari 100 orang pekerja di sektor pertanian, sekitar 65 orang adalah laki-laki, sementara perempuan sebanyak 35 orang. Ternyata dominasi serapan tenaga kerja perempuan dibanding laki-laki terdapat pada

sektor Jasa, yaitu sebesar 50,37 persen yang bekerja di sektor jasa adalah perempuan.

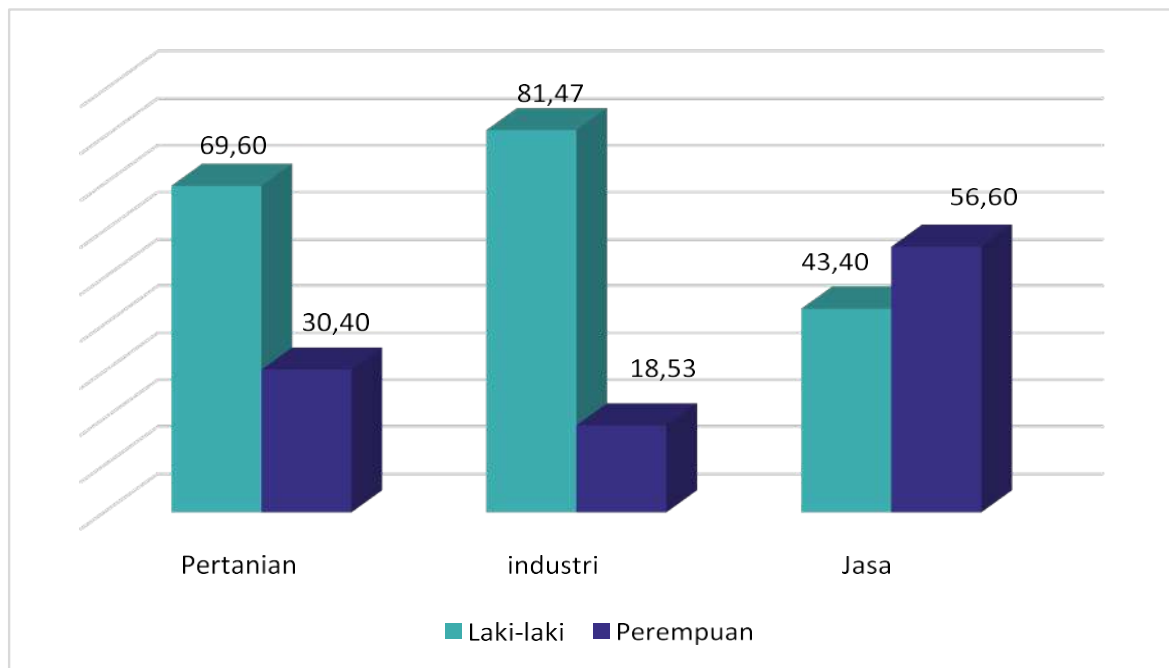
Jika melihat status pekerjaan, ternyata perempuan lebih dominan pada jenis pekerjaan yang tidak dibayar. Persentasenya cukup menonjol, dari sekitar 100 orang pekerja tak dibayar, 65 orang adalah perempuan. Sementara status pekerjaan lain yang bisa dikatakan menghasilkan pemasukan (status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh, karyawan, dan pekerja bebas), persentase laki- laki jauh mendominasi.

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Way Kanan, 2021 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Komponen IDG	2021
Keterlibatan perempuan di Parlemen	10,00 %
Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	60,29%
Sumbangan Pendapatan Perempuan	33,60%
IDG	60,36

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada Tabel diatas [22.04, 31/3/2024] Bapeda MbK Pipit: keterlibatan perempuan di Parlemen hanya sebesar 10 persen. Angka persentase ini masih jauh dibawah batas minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam parlemen [22.04, 31/3/2024] Bapeda MbK Pipit: sesuai amanat Undang-undang No.8 Tahun 2012. Hal ini menunjukkan masih rendahnya partisipasi perempuan dalam politik sehingga perlu adanya perhatian khusus bagi pemerintah mengenai peran perempuan dalam politik ini.

Selanjutnya, Persentase penduduk perempuan yang bekerja sebagai tenaga profesional sebesar 60,29 persen dan persentase sumbangan pendapatan perempuan sebesar 33,60 persen. Persentase penduduk perempuan yang bekerja sebagai tenaga profesional yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan terjadi perbaikan dari tahun sebelumnya yang masih dibawah 50 persen. Sedangkan, rendahnya persentase sumbangan pendapatan perempuan menunjukkan bahwa perekonomian masih didominasi oleh laki-laki. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik yang masih rendah sehingga diperlukan upaya serius dari pemerintah

daerah Kabupaten Way Kanan untuk mendorong perempuan agar dapat berperan lebih aktif menunjukkan bahwa persentase keterlibatan perempuan di Parlemen hanya sebesar 10 persen. Angka persentase ini masih jauh dibawah batas minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam parlemen sesuai amanat Undang-undang No.8 Tahun 2012. Hal ini menunjukkan masih rendahnya partisipasi perempuan dalam politik sehingga perlu adanya perhatian khusus bagi pemerintah mengenai peran perempuan dalam politik ini.

Selanjutnya, Persentase penduduk perempuan yang bekerja sebagai tenaga profesional sebesar 60,29 persen dan persentase sumbangan pendapatan perempuan sebesar 33,60 persen. Persentase penduduk perempuan yang bekerja sebagai tenaga profesional yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan masih perlu untuk diperhatikan. Sedangkan rendahnya persentase sumbangan pendapatan perempuan menunjukkan bahwa perekonomian masih didominasi oleh laki-laki. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik yang masih rendah tersebut diperlukan upaya serius dari pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan untuk mendorong perempuan agar dapat berperan lebih aktif.

Secara umum, capaian komponen IDG Kabupaten Way Kanan pada tahun 2022 untuk perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki, khususnya pada komponen partisipasi politik dan perekonomian. Dari Berbagai data diatas Pemerintah Kabupaten Way Kanan Melalui Dinas P3AP2KB melaksanakan Kegiatan:

Gender Analysis Pathway (GAP) adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Dengan menggunakan GAP, para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan dapat mengidentifikasi kesenjangan gender (gender gap) dan permasalahan gender (gender issues) serta sekaligus menyusun rencana kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan yang ditujukan un

tuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut. (Bappenas, 2001) Terdapat 9 (sembilan) langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan GAP. Langkah tersebut terbagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap analisis kebijakan yang responsif gender, tahap formulasi kebijakan yang responsif gender dan tahap pengukuran hasil. Dengan analisis gender model GAP maka setiap SKPD dapat merumuskan kebijakan/program/kegiatan responsif gender sesuai tugas dan fungsinya. Sedangkan, Gender Budget

Statement (GBS) adalah pernyataan anggaran gender, disebut juga dengan Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG). GBS merupakan dokumen akuntabilitas spesifik gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan suatu dana telah dialokasikan pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. (KPPPA, 2012: 18).

Pencapaian persentase Anggaran Responsif Gender di SKPD dari 50 Lembaga yang menjadi sasaran berdasarkan analisa GBS terdapat 10 SKPD yang telah menganggarkan ARG yaitu Dinas Dispenduk Capil, P3AP2KB, Pendidikan dan Kebudayaan, Bappeda, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Ketahanan Pangan, Pertanian, Pekerjaan Umum dan Industri Perdagangan.

Pada tahun 2023, dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki target sebesar 66,61 point pada Indeks Pemberdayaan Gender yang diuraikan sebagaimana berikut :

No	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Pemberdayaan Gender	67,28	Poin	Rilis BPS	-

Jika dilihat pada tabel uraian diatas, terlihat bahwa capaian pada Indikator Indeks Pemberdayaan Gender masih menunggu rilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Way Kanan. Namun demikian pada tahun 2023 dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah ada beberapa kegiatan yang sudah responsif gender yang mendukung tercapainya Indeks Pemberdayaan Gender, sebagaimana berikut :

- dilihat dari tabel dibawah ini :
- Pencapaian persentase Anggaran Gender di SKPD dari 50 SKPD yang menjadi sasaran berdasarkan analisa GBS terdapat 10 SKPD yang telah menganggarkan ARG yaitu Dinas Dispenduk Capil, P3AP2KB, Pendidikan dan Kebudayaan, Bappeda, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Ketahanan Pangan, Pertanian, Pekerjaan Umum dan Industri Perdagangan, artinya persentase Anggaran Responsiv.

a. Pembinaan 100 warga binaan P3KSS

Pada tahun 2023, Dinas P3AP2KB membina 100 warga P3KSS (Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sejahtera) yang dilaksanakan di Kampung Negeri Bumi Putera Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan dengan sasaran 100 Warga Miskin. Selain P3KSS juga dilaksanakan GSI (Gerakan Sayang Ibu) di Kecamatan Umpu Semenguk yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas perempuan melalui percepatan penurunan angka kematian ibu yang dilaksanakan bersama sama oleh Pemerintah dan Masyarakat. Dalam lomba GSI yang telah dilaksanakan tingkat Provinsi Kabupaten Way Kanan mendapatkan Juara Pertama Tingkat Provinsi.

b. Peningkatan ekonomi Kepala Keluarga Perempuan Miskin (5 Kepala Keluarga)

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Ekonomi Keluarga Perempuan pada tahun 2023 dilaksanakan di Kampung Negeri Bumi Putera dengan hasil

sebagai berikut :

Tabel Rekapitulasi Kepala Keluarga yang Diberi Pelatihan

N O	NAMA	NIK	TEMPAT LAHIR	ALAMAT	KETERANGA N USAHA
1	SUNARTI	18080168075900 02	SRIBAWON O	DUSUN SRIBAKT I	PEMBUATAN TEMPE
2	AWALLUDI N	18080121037200 01	TULANG BAWANG	DUSUN BAMBU KUNING	PEMBUATAN TAHU
3	ITA PURNAMA SARI	18042244068200 03	GEDUNG REJO	DUSUN SRIBAKT I	PEMBUATAN SEMPOL
4	YUYUN	18042209127900 02	KARAWAN G	DUSUN SIDODA DI	PEMBUATAN KOTAK BUAH
5	SULAMI	18080151096300 02	LAMPUNG TENGAH	DUSUN BAMBU KUNING	PEMBUATAN JAMU TRADISIONAL

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Way Kanan perihal Lokus Kemiskinan sehingga pelaksanaan peningkatan ekonomi kepala keluarga perempuan dilaksanakan di Kampung Bumi Putera Kecamatan Umpu Semenguk.

- c. Pelaksanaan kegiatan Pengarusutamaan Gender pada SKPD Gender Analysis Pathway (GAP) adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Dengan menggunakan GAP, para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan dapat mengidentifikasi kesenjangan gender (gender gap) dan permasalahan gender (gender issues)serta sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut. (Bappenas,

2001) Terdapat 9 (sembilan) langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan GAP. Langkah tersebut terbagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap analisis kebijakan yang responsif gender, tahap formulasi kebijakan yang responsif gender dan tahap pengukuran hasil. Dengan analisis gender model GAP maka setiap SKPD dapat merumuskan kebijakan/ program/ kegiatan responsif gender sesuai tugas dan fungsinya. Sedangkan, Gender Budget Statement (GBS) adalah pernyataan anggaran gender, disebut juga dengan Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG). GBS merupakan dokumen akuntabilitas spesifik gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan suatu dana telah dialokasikan pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. (KPPPA, 2012: 18)

Dalam langkah melaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender maka hal yang dilaksanakan pertama kali adalah penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP), maka dilanjutkan dengan penyusunan Gender Budget Statement (GBS) atau pernyataan anggaran gender. GBS adalah dokumen yang menyatakan tentang adanya keadilan dan kesetaraan gender dalam perencanaan dan penganggaran suatu program dan kegiatan dalam pembangunan. Pencapaian persentase Anggaran Responsif Gender di SKPD dari 50 Lembaga yang menjadi sasaran berdasarkan analisa GBS terdapat 18 SKPD yang telah menganggarkan ARG yaitu Dinas Dispenduk Capil, P3AP2KB, Pendidikan dan Kebudayaan, Bappeda, Kesehatan,

Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Ketahanan Pangan, Pertanian, Pekerjaan Umum dan Industri Perdagangan. Pada dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah ada beberapa kegiatan yang sudah responsif gender, sebagaimana terlihat pada data dibawah ini:



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan KM. 2 Telp (0721) 461004
BLAMBANGAN UMPU

**JUMLAH LEMBAGA PEMERINTAH TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG
DILATIH PUG**

NO.	SKPD
1	DINAS PERIKANAN
2	DISNAKERTRANS
3	DINAS PERHUBUNGAN
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	BKPSDM
6	DINAS KETAHANAN PANGAN
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8	DINAS KESEHATAN
9	DINAS PERPUSDA DAN KEARSIPAN
10	DINAS TPHP
11	DISPORAPAR
12	BPED
13	BAPENDA
14	DINAS PSAP2KB
15	DRMPTSP
16	INSPEKTORAT
17	DINAS SOSIAL
18	SATPOLPP
19	INDAG
20	FU
21	PMK
22	BAPEDA
23	KOMINFO
24	PERKEBUNAN
25	BPKAD
26	DUKCAPIL
27	KOPERASI
28	PERKIM
29	KESBANG
30	DPRD
31	KEMENAG
32	RSUD

Dari hasil Pelatihan yang dilaksanakan kepada 32 SKPD diatas maka diperoleh rekap program hasil Responsif Gender dengan uraian sebagaimana berikut :


DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan KM. 2 Telp (0721) 461004
BLAMBANGAN UMPU

JUMLAH PROGRAM ARG YANG SUDAH DIEVALUASI MELALUI GAB / GBS

NO.	PROGRAM	SKPD
1	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DINAS PERIKANAN
2	PENEMPATAN TENAGA KERJA	DISNAKERTRANS
3	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN
4	PENGEMBANGAN KNERIA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM
6	PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DINAS KETAHANAN PANGAN
7	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8	PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN	DINAS KESEHATAN
9	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSDA DAN KEARSIPAN
10	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DINAS TRHP
11	PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPENUDAAN	DISPORAPAR
12	PENANGGULANGAN BENCANA	BPSD
13	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA
14	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DINAS P3AP2KB
15	PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DFNPTSP
16	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT
17	PENANGANAN BENCANA	DINAS SOSIAL
18	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	SATPOLPP

Blambangan Umpu, 17 Januari 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


INDRA KESUMA, S.Sos.
 NIP. 19630612 199003 1007

Dari hasil evaluasi atas pelatihan yang diperoleh dengan jumlah 18 program responsif gender yang ada pada masing- masing SKPD sesuai uraian diatas maka diperoleh sebagai berikut :

LEMBAGA I
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KEMENTERIAN DESA, KEMASYARAKATAN,
PELAYANAN SIPIL DAN TRANSFORMASI
DIGITAL
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN ANGGARAN 2023

RABUPATEN WAY BAKAN SINGKELAH APBD YANG DILAKUKAN MENURUT REKOMENDASI DAN ASPEK PENGAPAIAN, WILAYAH, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023		
Kode	Uraian	Jumlah
4	PENGAPAIAN DAERAH	
4.1	PENGAPAIAN ASLI DAERAH (PAD)	82.797.000.710
4.1.01	Pajak Daerah	21.007.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	2.001.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Laba-laba Daerah yang Dimorogkan	4.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	55.789.000.710
4.2	PENGALIHAN TRANSFER	1.348.117.000.000
4.2.01	Pemindahan Transfer Non-mengikat Pajak	1.113.011.415.000
4.2.02	Pemindahan Transfer Insentif Daerah	235.095.585.000
4.3	LAIN-LAIN PENGALIHAN DAERAH YANG SAH	200.000.000
4.3.01	Lain-lain Pemindahan Uang dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	200.000.000
	Jumlah Pengapian	1.231.200.070.710
5	WILAYAH	
5.1	BELANJA OPERASI	809.961.110.107
5.1.01	Belanja Pegawai	100.430.000.730
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.744.000.000
5.1.03	Belanja Hibah	40.200.000.000
5.1.09	Belanja Bantuan Sosial	7.587.000.000
5.2	BELANJA MODAL	181.270.000.000
5.2.01	Belanja Modal Perbaikan dan Merorog	20.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.750.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, jembatan, dan Irigasi	60.140.000.000
5.2.05	Belanja Modal Alat Kerja Lainnya	300.000.000
5.2.06	Belanja Modal Alat Lainnya	2.000.000.000
5.3	BELANJA TRIAS TERPADU	3.000.000.000
5.3.01	Belanja Trias Terpadu	3.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	200.070.200.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.000.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	198.070.200.000
	Jumlah Belanja	1.231.231.270.114
	Total Bayaran/Debit	(8.000.000.000)
6	PERUBAHAN	
6.1	PERUBAHAN PERUBAHAN	6.000.000.000
6.1.01	Ura Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.000.000.000
	Jumlah Perubahan Pembiayaan	6.000.000.000
6.2	PERUBAHAN PERUBAHAN	2.000.000.000
6.2.01	Perubahan Modal Dasar	2.000.000.000
	Jumlah Perubahan Pembiayaan	2.000.000.000
	Pembiayaan Neto	6.000.000.000
6.3	Ura Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berjalan	0
	TOTAL APBD	1.231.231.270.114

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BEMAH-BUKUM,
BETDA
ARIS RUPRIYANTO, S.H., M.H.

BUPATI WAY KARAN,

Drs.

BAJEN AZEPATI SURYA

3.4. Analisis dan Evaluasi Kinerja

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja terhadap 4 (empat) tujuan, 9 (sembilan) sasaran strategi, 13 (tiga belas) indikator kinerja sasaran, 9(sembilan) buah program yang telah dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan untuk periode bulan Januari s.d Desember 2023 menunjukkan prestasi sebagai berikut:

Tabel 3.10. Rentang Capaian, Kategori Capaian dan Indikator Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Way Kanan Tahun 2023

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN	JUMLAH INDIKATOR KINERJA SASARAN
I	> 100 %	Sangat baik	0
II	> 90 % - 100 %	Baik	12
III	>70 % - 90 %	Cukup	0
I	> 55 % - 70 %	Kurang	0
V	> 0 % - 55 %	Sangat kurang	0
V	Sama dengan 0	Belum terukur	1
I			

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan telah dapat dilaksanakan, demikian juga sasaran yang ditetapkan telah dapat dilaksanakan, meskipun masih

terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan lagi dimasa mendatang.

Dari 9 (tujuh) sasaran strategi dan 13 (tiga belas) indikator kinerja sasaran yang hendak dicapai bahwa diperoleh 4(empat) buah indikator kinerja sasaran telah melampaui target dengan kategori capaian sangat baik, 5 (lima) buah indikator kinerja sasaran telah tercapai target 100% dengan kategori capaian baik, 3 (tiga) buah indikator kinerja sasaran yang capaian kinerjanya dengan kategori capaian cukup.

3.5 Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun anggaran 2023, akuntabilitas keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11. Realisasi Belanja Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Way Kanan Tahun 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)	KET
1	Belanja Kegiatan	8.677.388.250	5.810.724.251	66,96%	
2	Belanja Gaji Dan Tunjangan	5.080.515.275	4.984.957.251	98,11%	
	JUMLAH	13.757.903.525	10.795.681.502	78,47%	

Uraian	INDIKATOR KEGIATAN	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja (%)
2	3	4	5	6
BELANJA TIDAK LANGSUNG				
BELANJA LANGSUNG				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP DINAS P3AP2KB	Poin	60,64	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentasi Keselarasan dokumen Perencanaan	%	100	100
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	100
Sub Kegiatan Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	100
Sub Kegiatan Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	100
Sub Kegiatan Koordinasi & Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	100
Sub Kegiatan Koordinasi & Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi & Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	100
Sub Kegiatan koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	100
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	100
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dibayar dan dokumen yang disusun	orang	48	100
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	1	100
Sub Kegiatan Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	100
Sub Kegiatan koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	1	100
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan & Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	100
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	1	100

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan operasional SKPD	Paket	1	100
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan & Perlengkapan kantor	Jumlah Dokumen Kegiatan Penyediaan Peralatan & Perlengkapan kantor	Dokumen	1	100
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	100
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	1	100
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	100
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan persuratan, rekening dan pegawai yang dibayarkan	%	100	100
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	4	100
Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan & pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	unit	2	100
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah rekening koran dan listrik yang dibayar	Lapran	1	78
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor, jaga malam, pengemudi yang dibayar	Orang	3	100
Program Pengarusutamaan Gender & Pemberdayaan Perempuan	Presentase Lembaga yang Telah Menerapkan ARG	%	5	
Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah pelatihan ARG	Kegiatan	2	100
Sub Kegiatan Koordinasi & Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100
Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial & Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial & Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	100
Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan & Politik, Hukum, Sosial & Ekonomi	Jumlah perempuan Kepala Keluarga Miskin mendapatkan pengetahuan tentang Usaha Ekonomi kreatif.	Orang	5	100
Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan & Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan & Politik, Hukum, Sosial & Ekonomi	Jumlah Organisasi Perempuan yang mendapatkan Pembinaan	Organisasi	6	100
Program Perlindungan Perempuan	Presentase penanganan kasus Kekerasan Pada Perempuan	%	100	
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa	Orang	15	300

Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan & Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentasenya Pendampingan Terhadap Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	%	100	100
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Keluarga Yang Telah Dibina Tentang Hak Anak	%	15	100
Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) & Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) & Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100
Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan	Lembaga	6	100
Kegiatan Penguatan & Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan KG & Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang telah mewujudkan kesetaraan gender	%	10	
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan	Lembaga	2	100
Penyedia Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kegiatan	1	100
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Presentase data gender dan anak yang terintegrasi dalam satu data way kanan	%	15	100
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagan Data di Tingkat Dearah Kabupaten/Kota	Dokumen Data Gender	Dokumen	1	100
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan anak Kab/Kota tersedia	Dokumen	1	100
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Presentase Peningkatan Pelembagaan Pemenuhan HAK Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Dan Dunia Usaha	%	70	

Kegiatan Penguatan & Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentasi Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	%	100	97
Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	%	28	97
Program Perlindungan Khusus Anak	Presentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terselesaikan	%	100	100
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persenti Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap anak	%	100	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100
Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Dearah Kabupaten/Kota	PersentaseJumlah anak yang memerlukan pelindungan	%	100	100
Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PersentaseJumlah anak yang memerlukan pelindungan	%	100	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100
Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lmbaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	Dokumen	1	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	Dokumen	1	100
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kabupaten/Kota			
Program Pengendalian Penduduk	Presentase laju pertumbuhan Penduduk	%	0,9	
Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	jumlah KK yang terdata			
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	Jumlah Dokumen GDPK	Dokumen	1	100

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100
Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100
Sub Kegiatan Pencatatan & Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Dokumen	1	100
Sub Kegiatan Pengelolaan & Pelaporan Data Pengendalian Lapangan & Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	1	100
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Presentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (Unmetned)	%	9	
Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi & Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk & KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi & Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk & KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	1	100
Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK Kepada Stakholders & Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	oragnisasi	6	100
Sub Kegiatan Promosi & KIE Program KKBPK Melalui Media Masa Cetak & Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media	Dokumen	1	100
Sub Kegiatan Penggunaan Media Massa Cetak ,Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah dokumen Kegiatan Penggunaan Media Massa Cetak ,Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan	Dokumen	1	100

	Program KKBPK			
Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam),Rapat Koordinasi Desa (Rakordes),& Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	1	100
Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional & Sarana Di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	1	100
Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	Dokumen	1	100
Sub Kegiatan Pembinaan IMP & Program KKBPK Di Lini Lapangan Oleh PKB/PLKB	Jumlah PKB /PLKB dan yang dibina	orang	454	100
Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Laporan	1	100
Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan,Penggerakan,Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana /Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	1	100
Sub Kegiatan Pengerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	JumlahKader IMP yang dibina	Orang	454	100
Kegiatan Pengendalian & Pendistribusian Kebutuhan Alat & Obat Kontraspsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LaporanKegiatan Pengendalian & Pendistribusian Kebutuhan Alat & Obat Kontraspsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	100
Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat & Obat Kontraspsi & Saran Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan & Jejaringnya	Jumlah Faskes yg telah mendapatkan distribusi Alkon	Faskes	25	53
Kegiatan Pengendalian & Pendistribusian Kebutuhan Alat & Obat Kontraspsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pengendalian & Pendistribusian Kebutuhan Alat & Obat Kontraspsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di	Laporan	1	100

	Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Penyediaan Pelayanan Medis Operasi	Asektor	3575	60
Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana & Kesehatan Reproduksi Di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan & Jejaringnya	Jumlah Paskes yang menerima pelayanan KKB	Faskes	25	100
Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Penyediaan Pelayanan KB bagi PUS	gerak	28	100
Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten?kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Aseptor yang dibina			
Sub Kegiatan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Penyediaan Pelayanan KB bagi PUS	Gerak	28	100
Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor Di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	1	50
Sub Kegiatan Pelaksanaan & Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Aseptor yang dibina	Aseptor	3575	70
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	presentase Pembinaan BKB	%	10	
Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	100
Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB,BKR,PIK-R,BKL,dan UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Penyediaan Pelayanan KB bagi PUS	Aseptor	329	100
Sub Kegiatan Penyediaan biaya operasional bagi pengelola & pelaksana (Kader) ketahanan & kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R & Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	kader	454	100
Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	100
Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS	Jumlah Penyediaan Pelayanan KB bagi PUS	Aseptor	329	100

Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	1	1
--	---	---------	---	---

Tabel 3.12 Realisasi Belanja Per Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023

Uraian	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
2	3	4	5
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.994.823.404	4.003.537.029	
BELANJA LANGSUNG	8.561.200.000	7.493.961.784	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.147.584.020	1.053.666.884	91,81
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.415.220	42.415.220	100
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.800.000	6.800.000	100
Sub Kegiatan Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.621.170	4.621.170	100
Sub Kegiatan Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.915.850	7.915.850	100
Sub Kegiatan Koordinasi & Penyusunan DPA-SKPD	6.386.050	6.386.050	100
Sub Kegiatan Koordinasi & Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.220.000	5.220.000	100
Sub Kegiatan koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	6.500.000	6.500.000	100
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.972.150	4.972.150	100
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	122.539.400	122.503.950	99,97
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	76.750.000	76.750.000	100

ASN			
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.136.000	4.136.000	100
Sub Kegiatan Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.671.500	8.671.500	100
Sub Kegiatan koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	8.081.900	8.081.900	100
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan & Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.900.000	4.864.550	99,27
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000	20.000.000	100
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	358.100.000	315.896.326	88,21
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan & Perlengkapan kantor	73.250.000	73.089.380	99,78
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.600.000	14.600.000	100
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan & Pengandaan	10.000.000	10.000.000	100
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	260.250.000	218.206.946	83,84
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah	143.890.000	134.451.112	83,85
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.700.000	44.700.000	100
Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan & pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	25.000.000	25.000.000	100
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air & Listrik	43.590.000	34.151.112	78,34
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.600.000	30.600.000	100
Program Pengarusutamaan Gender & Pemberdayaan Perempuan	460.000.000		
Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	15.000.000	100
Sub Kegiatan Koordinasi & Singkronisasi Pelaksanaan PUG	15.000.000	15.000.000	100

Kewenangan Kabupaten/Kota			
Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial & Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	445.000.000	445.000.000	100
Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan & Politik,Hukum,Sosial & Ekonomi	20.000.000	20.000.000	100
Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan & Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan & Politik,Hukum,Sosial & Ekonomi	425.000.000	425.000.000	100
Program Perlindungan Perempuan	16.606.400	16.606.400	100
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	16.606.400	16.606.400	100
Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan & Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	16.606.400	16.606.400	100
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	168.101.500	166.858.191	99,26
Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) & Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	114.141.500	113.387.891	99,33
Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	114.141.500	113.387.891	99,33
Kegiatan Penguatan & Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan KG & Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	31.560.000	31.070.300	99,35
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.560.000	31.070.300	98,44
Penyedia Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	22.400.000	22.400.000	98,45

Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	22.400.000	22.400.000	100
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	5.700.000	5.700.000	100
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagan Data di Tingkat Dearah Kabupaten/Kota	5.700.000	5.700.000	100
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	5.700.000	5.700.000	100
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	61.531.000	59.700.825	97
Kegiatan Penguatan & Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	61.531.000	59.700.825	97
Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61.531.000	59.700.825	97
Program Perlindungan Khusus Anak	555.131.000	416.477.790	75,02
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	109.700.000	106.110.000	97
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	109.700.000	106.110.000	96,72
Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Dearah Kabupaten/Kota	445.431.000	310.367.790	69,67
Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.564.900	31.440.000	96,54
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	254.504.000	121.845.690	47,87

Kewenangan Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	91.262.100	91.262.100	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	67.100.000	65.820.000	99
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
Program Pengendalian Penduduk	346.149.000	310.473.150	85,61
Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	11.539.000	5.625.800	48,75465812
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	11.539.000	5.625.800	48,75
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	334.610.000	304.847.350	85,21
Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000	63.237.350	98,50
Sub Kegiatan Pencatatan & Pengumpulan Data Keluarga	186.410.000	157.610.000	84,55
Sub Kegiatan Pengelolaan & Pelaporan Data Pengendalian Lapangan & Pelayanan KB	84.000.000	84.000.000	100
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.763.483.150	2.868.277.850	60,60
Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi & Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk & KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.658.020.150	1.397.399.850	60,61
Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK Kepada Stakholders & Mitra Kerja	80.000.000	48.475.000	60,59
Sub Kegiatan Promosi & KIE Program KKBPK Melalui Media Masa Cetak & Elektronik Serta Media Luar Ruang	150.000.000	150.000.000	100

Sub Kegiatan Penggunaan Media Massa Cetak ,Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	15.919.850	15.919.850	100
Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam),Rapat Koordinasi Desa (Rakordes),& Mini Lokakarya (Minilok)	182.000.000	182.000.000	100
Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional & Sarana Di Balai Penyuluhan KKBPK	450.100.000	408.100.000	90,66
Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	66.400.000	83
Sub Kegiatan Pembinaan IMP & Program KKBPK Di Lini Lapangan Oleh PKB/PLKB	700.000.300	574.980.000	82,13
Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	470.000.000	469.170.000	82,14
Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan,Penggerakan,Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana /Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana	16.000.000	15.170.000	94,81
Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	454.000.000	454.000.000	100
Kegiatan Pengendalian & Pendistribusian Kebutuhan Alat & Obat Kontraspsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	21.600.000	11.523.000	53,34
Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat & Obat Kontraspsi & Saran Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan & Jejaringnya	21.600.000	11.523.000	53,34
Kegiatan Pengendalian & Pendistribusian Kebutuhan Alat & Obat Kontraspsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	1.047.153.000	603.230.000	53,35
Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.006.603.000	562.680.000	55,89

Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana & Kesehatan Reproduksi Di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan & Jejaringnya	14.700.000	14.700.000	100
Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	25.850.000	25.850.000	100
Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten?kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	566.710.000	386.955.000	68,28
Sub Kegiatan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	61.710.000	61.710.000	100
Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor Di Kampung KB	9.000.000	3.000.000	33,33
Sub Kegiatan Pelaksanaan & Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	496.000.000	322.245.000	64,96
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.400.520.000	2.289.220.000	95,35
Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.380.520.000	2.269.220.000	95,36
Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB,BKR,PIK-R,BKL,dan UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	43.220.000	43.220.000	100
Sub Kegiatan Penyediaan biaya operasional bagi pengelola & pelaksana (Kader) ketahanan & kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R & Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.337.300.000	2.226.000.000	95
Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan	20.000.000	20.000.000	95

dan Kesejahteraan Keluarga			
Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS	15.000.000	15.000.000	100
Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bagi Mitra Kerja	5.000.000	5.000.000	100
BELANJA LANGSUNG	4.994.823.404	4.003.537.029	80,2
BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.561.200.000	7.493.961.784	87,53
TOTAL	13.556.023.404	11.497.498.813	84,81

Realisasi belanja anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-NF), dengan Pagu sebesar Rp. 13.556.023.404,-, terealisasi sebesar Rp. . 11.497.498.813,- atau 80,2 % Belanja Langsung dan 87,53 % Belanja Tidak Langsung.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan kepada para *stakeholder* dalam rangka mencapai suatu pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip transparan, efektif dan efisien, serta akuntabel dalam pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaannya selama tahun 2023, program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan sebagaimana telah dituangkan kedalam rencana kerja, secara umum telah dapat direalisasikan.

Berdasarkan hasil analisis atas capaian kinerja terhadap 5(sembilan) sasaran strategi dan 5 indikator kinerja sasaran yang hendak dicapai bahwa diperoleh 2 buah indikator kinerja sasaran telah melampaui target dengan kategori capaian sangat baik, 3 (enam) buah indikator kinerja sasaran telah tercapai target 100% dengan kategori capaian baik, 3 (tiga) buah indikator kinerja sasaran yang capaian kinerjanya dengan

kategori capaian cukup serta 1 (satu) buah indikator kinerja sasaran dengan kategori capaian belum kurang, indikator kinerja sasaran dimaksud yaitu persentase anggaran gender di SKPD, hal ini disebabkan dari 50 SKPD yang telah menganggarkan ARG pada GBS baru 10 SKPD di Kabupaten Way Kanan hal ini disebabkan kurangnya koordinasi lintas sektor dan pengetahuan dan pemahaman pengelola anggaran terhadap Anggaran Responsif Gender.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2021, masih banyak kelemahan dan kendala dalam pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya:

- 1) Program dan kegiatan belum secara maksimal menjawab sasaran dari rencana strategis yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 2) Pencapaian indikator keberhasilan sasaran masih bersifat refleksional yang tidak secara langsung dapat diukur.
- 3) Kemampuan sumberdaya manusia dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan belum maksimal.
- 4) Perencanaan program dan kegiatan belum mampu menjawab kebutuhan karena keterbatasan anggaran yang tersedia.

4.2 Saran

Agar semua sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara maksimal maka tentu perlu dilakukan evaluasi menyeluruh setiap sasaran yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan ataupun yang belum tercapai secara maksimal. Seperti telah diuraikan sebelumnya yang merupakan faktor yang turut mempengaruhi pencapaian target adalah ketersediaan anggaran, maka yang menjadi saran kiranya pembangunan

dibidang Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana hendaknya benar-benar menjadi skala prioritas mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan realisasi anggaran. Sebab kelemahan ini sangat mempengaruhi tingkat pencapaian target sasaran yang telah dirumuskan pada Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2023.

Untuk itu kedepan perlu dilakukan upaya strategi pemecahan masalah yang harus dilakukan antara lain adalah:

1. Menyusun jadwal pelaksanaan program dan kegiatan secara tepat
2. Menyusun rencana monitoring, evaluasi dan pengawasan
3. Berusaha mewujudkan perencanaan program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan dan lebih menekankan pada pencapaian sasaran dari rencana strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
4. Meningkatkan kualitas SDM pelaksana
5. Melakukan sinkronisasi perencanaan sampai pada satuan UPTD Kecamatan.

Demikian LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, sumbang saran dan masukan sangat kami nantikan guna perbaikan dalam penyusunan LKjIP dimasa yang akan datang.